

Daftar Isi

Dari Redaksi

Hal. 2

Strategi Ekspor dalam Kilauan Emas Indonesia

Strategi ekspor emas Indonesia memiliki peran cukup penting mengingat permintaan terhadap emas Indonesia cukup baik. Sepanjang periode 2009-2013 terjadi pertumbuhan rata-rata 8,1% setiap tahunnya. Negara yang menjadi tujuan utama produk emas Indonesia adalah Singapura yang tumbuh mengesankan diatas 20% sepanjang periode 2009-2013.

Layakkah Perdagangan Bebas Indonesia-Peru?



Hal. 6

Ekonomi Indonesia jauh lebih besar dari Peru dengan PDB 2013 sebesar USD 1,29 triliun bila dibandingkan dengan Peru yang hanya USD 0,34 triliun. Dari sisi populasi, jumlah penduduk Peru hanya 30 juta, sangat kecil jika dibandingkan dengan total populasi Indonesia yang mencapai 254 juta. Ekonomi Peru juga sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dunia. Maka, sudah selayaknya bila potensi perdagangan bebas kedua negara dikaji kembali.

Shanghai, Gerbang Meraih Pasar RRT

Hal. 12



Mendongkrak Nilai Ekspor TPT Indonesia melalui Batik

Hal. 16

Permintaan batik Indonesia di pasar dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan pasca pengukuhan batik Indonesia oleh UNESCO. Nilai ekspor produk batik meningkat dari USD 23 juta pada 2009 menjadi USD 289 juta tahun 2013. Industri batik juga menyumbang sekitar 10% terhadap kinerja perdagangan produk garmen nasional.



Layakkah Handphone Masuk Kategori Barang Modal?

Hal. 20

Tidak semua data impor barang modal yang didasarkan kepada klasifikasi BEC, termasuk *handphone*, dimasukkan sebagai barang modal. Klarifikasi lebih lanjut masih diperlukan untuk menentukan apakah suatu barang tahan lama termasuk yang diimpor, diperlakukan sebagai barang modal atau tidak, yaitu tergantung kepada penggunaan barang tersebut sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah atau digunakan sebagai konsumsi akhir.



Masih Perlukah Stabilisasi Harga Pangan?

Hal. 23



Kecenderungan global menggiring kita bahwa stabilisasi harga pangan, khususnya pangan yang sangat pokok, memang masih diperlukan. Stabilisasi harga pangan merupakan salah satu komponen utama keterjangkauan pangan, salah satu pilar dari ketahanan pangan. Pertanyaannya sekarang, pangan mana saja yang harganya perlu distabilkan?

Berita Pendek Perdagangan
Halaman 27

Serba - Serbi
Halaman 32

Statistik Perdagangan
Pusdatin
Halaman 34

Strategi Ekspor dalam

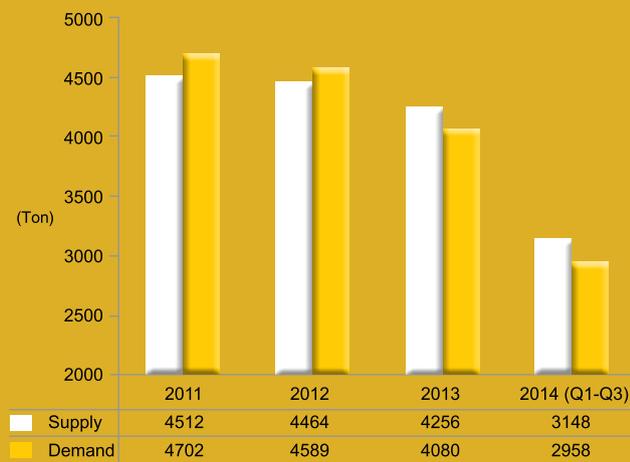


Kilauan Emas Indonesia

Hasni

Kondisi Supply Demand Emas Dunia

Tidak dapat dipungkiri emas merupakan salah satu kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Sejarah mencatat emas Indonesia telah dieksplorasi sejak ribuan tahun lalu. Di zaman teknologi canggih seperti saat ini, pengelolaan tambang emas di Indonesia masih didominasi oleh segelintir investor asing seperti PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Emas bukan hanya logam mulia namun juga investasi abadi bagi siapapun yang memilikinya. Sepatutnya kekayaan emas yang terkandung dalam tanah nusantara dapat dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri. Lokasi lahan pertambangan emas dunia terdapat di setiap benua, namun karena eksploitasi yang dilakukan secara terus menerus menyebabkan cadangan emas dunia semakin berkurang. Berikut adalah gambaran kondisi *supply* dan *demand* emas dunia periode tahun 2011-2014.



Gambar 1. Kondisi Supply dan Demand Emas Dunia, 2011-2014.

Sumber: *World Gold Council* (2014)

Gambar 1 terlihat bahwa volume permintaan (*demand*) dunia mengalami penurunan sebagai akibat dari krisis di berbagai negara, termasuk krisis di Ukraina. Pertumbuhan rata-rata volume permintaan emas dunia selama tiga tahun terakhir yaitu periode 2011-2013 turun 6,8% per tahun.

Sedangkan pasokan (*supply*) emas dunia pada periode yang sama hanya turun 2,9% per tahun. Melihat kondisi sampai kuartal III, diperkirakan *supply* dan *demand* pada tahun 2014 akan lebih rendah dibanding 2013. Sementara menurut laporan *World Gold Council* pada *Gold Demand Trends Q3 2014*, Indonesia merupakan pasar emas terbesar di Asia, namun mengalami penurunan permintaan pada kuartal III-2014 hingga dibawah 10 ton, sebagai dampak meningkatnya permintaan emas tahun lalu dan pemilihan Presiden di bulan Juli 2014 yang mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi sehingga menurunkan pengeluaran masyarakat terhadap emas.

Tahun 2014 cadangan emas dunia yang tercatat di bank sentral masing-masing negara totalnya mencapai 32 ribu ton. Negara dengan cadangan emas terbesar adalah Amerika Serikat sebesar 8,1 ribu ton, sedangkan Jerman dan Italia menempati urutan kedua dan ketiga dengan cadangan emas masing-masing mencapai hampir 3,4 ribu ton dan 2,5 ribu ton. Sementara cadangan emas Indonesia tahun 2014 menurut data yang bersumber dari *International Financial Statistics* (IFS) berada di posisi 40 besar dunia dengan *volume* cadangan emas mencapai 78,1 ton.

Tabel 1. Negara yang Memiliki Cadangan Emas Terbesar, 2014

No.	Negara	Cadangan Emas (Ton)
1	AS	8133.5
2	Jerman	3384.2
3	Italia	2451.8
4	Perancis	2435.4
5	Rusia	1168.7
6	RRT	1054.1
7	Swiss	1040
8	Jepang	765.2
9	Belanda	612.5
10	India	557.7
40	Indonesia	78.1
	World	32,139.1

Sumber: IFS (2014)



Tabel 2 menyajikan data produksi untuk 10 negara penghasil emas terbesar di dunia, dengan RRT menduduki peringkat pertama, sementara Indonesia menduduki peringkat ke 10 sebagai negara penghasil emas di dunia. *Metal Focus* (2014) melaporkan bahwa RRT masih menjadi negara produsen emas terbesar dunia dengan produksi sebesar 14,1 *million ounces* (Moz) pada 2013, tumbuh 6,1% dibanding produksi tahun 2012. Pada masa yang akan datang produksi emas Afrika Selatan yang selama ini cukup mendominasi dunia selama hampir satu abad diperkirakan tidak akan bertahan lama di posisi ke lima sebagai negara tambang karena nilainya diperkirakan akan semakin turun. Sedangkan Indonesia sendiri tahun 2013 memproduksi 3,09 Moz emas atau mengalami peningkatan 8,8% dibanding produksi tahun 2012. Dari sepuluh negara penghasil emas utama dunia tahun 2013, Kanada merupakan negara yang paling pesat pertumbuhan produksinya, yang mencapai 4,01 Moz atau tumbuh 19,3%.

Tabel 2. Negara Produsen Emas Terbesar Dunia

No	Negara	2012(Moz)	2013 (Moz)	Perubahan (%)
1	RRT	13.29	14.1	6.09
2	Australia	8.1	8.53	5.31
3	Rusia	7.37	7.99	8.41
4	AS	7.54	7.42	(1.59)
5	Afrika Selatan	5.78	5.84	1.04
6	Peru	5.94	5.77	(2.86)
7	Kanada	3.36	4.01	19.35
8	Meksiko	3.34	3.34	-
9	Ghana	3.17	3.27	3.15
10	Indonesia	2.84	3.09	8.80
	Global	92.45	96.73	4.63

Sumber: *Metals Focus* (2014)

Tren Harga Emas Internasional

Sepanjang tahun 2014 harga emas internasional mengalami fluktuasi, dimana harga terendah terjadi pada bulan November yaitu USD 36,21/gram, sedangkan puncak harga emas tertinggi dialami pada bulan Februari 2014 dengan harga mencapai USD

41,26/gram. Menurut pengamat emas internasional, paruh kedua tahun 2014 merupakan masa yang cukup sulit bagi penambang emas dan negara eksportir logam (*World Gold Council*, 2014). Sebelumnya sejak tahun 2006 harga emas melambung dan naik secara konsisten dan bahkan krisis keuangan global 2008-2009 tidak begitu mempengaruhi kenaikan harga emas dunia. Pada Gambar 2 terlihat bahwa sejak Juli 2014 hingga akhir tahun 2014 harga rata-rata emas berada dibawah USD 40/gram.



Gambar 2. Harga Emas Internasional, 2014.

Sumber: *World Gold Council* (2014)

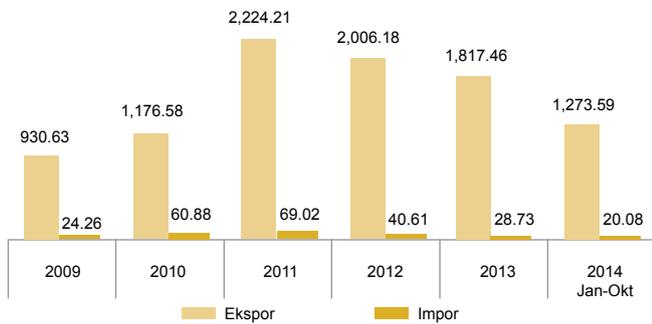
Meningkatnya ketidakpastian di pasar global, yang muncul akibat terjadinya krisis di Ukraina sedikit berpengaruh pada produksi dan perdagangan emas dunia. Perusahaan produsen emas papan atas dunia, Barrick Gold, mempertahankan posisi teratas. Kemudian disusul Newmont dan AngloGold, meskipun terjadi penurunan sekitar 3% terhadap *output* yang sebagian besar disebabkan terjadinya mogok kerja di tambang Emas di Nevada dan Veladero (Argentina). Barrick Gold juga memperkirakan produksi di tahun depan cenderung turun setelah Australia melakukan divestasi aset emas karena lebih fokus ke produk tembaga.

Kinerja Perdagangan Emas Indonesia

Permintaan terhadap emas Indonesia cukup baik, sepanjang periode 2009-2013 terjadi pertumbuhan rata-rata 8,1% setiap tahunnya. Adapun negara yang menjadi tujuan utama produk emas Indonesia adalah Singapura yang tumbuh mengesankan diatas 20% sepanjang periode 2009-2013. Sementara ekspor produk emas ke Australia di periode yang sama juga tumbuh

sebesar 5%. Sebaliknya permintaan dari Hongkong pada periode yang sama mengalami penurunan 6%. Selain ekspor, Indonesia juga mengimpor produk emas namun kinerjanya turun 9% per tahun (2009-2013). Perkembangan nilai perdagangan emas periode 2009 – 2014 (Januari-Oktober) dapat dilihat lebih lengkap pada Gambar 3.

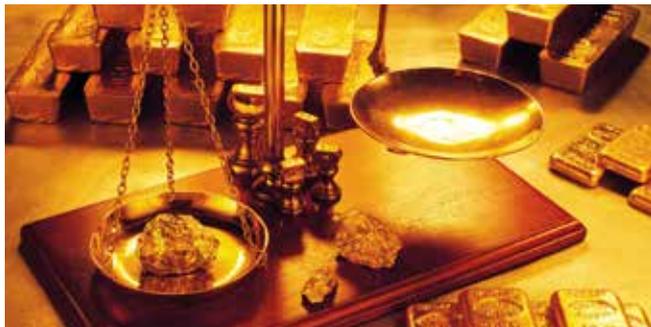
Nilai Perdagangan Emas Indonesia (USD Juta)



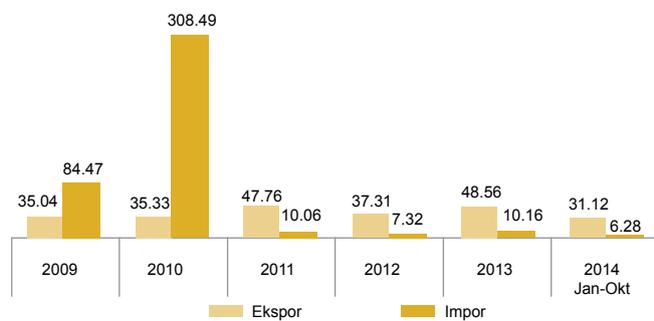
Gambar 3. Nilai Perdagangan Emas Indonesia, 2009-2014.

Keterangan Data: HS: 7108110000, 7108121000, 7108130000, 7108200000
 Sumber: BPS (2014), diolah

Sementara jika dilihat dari sisi volume, perdagangan emas Indonesia pada periode tahun 2009-2014 terlihat mengalami fluktuasi. Volume ekspor emas tertinggi terjadi pada tahun 2013 dengan volume mencapai 48 ton lebih. Sedangkan tren pertumbuhan volume ekspor produk emas untuk periode 2009-2013 mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 7,3% per tahun. Di sisi lain, pertumbuhan impor produk emas di periode yang sama turun rata-rata 55% per tahun. Sedangkan jika dibandingkan antara nilai impor dan volume impor emas, terlihat fenomena kenaikan harga emas di tahun 2011. Dari Gambar 3 terlihat bahwa nilai impor emas paling tinggi terjadi di tahun 2011, namun jika dibandingkan dengan Gambar 4 ternyata volume impor terbesar terjadi pada tahun 2010. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan harga impor produk emas di tahun 2011, sehingga mengakibatkan nilai impor emas besar meskipun volumenya kecil.



Volume Perdagangan Emas Indonesia (Ton)



Gambar 4. Volume Perdagangan Emas Indonesia, 2009-2014.

Keterangan Data: HS : 7108110000, 7108121000, 7108130000, 7108200000
 Sumber: BPS (2014), diolah

Strategi Ekspor Emas Indonesia ke Depan

PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau lebih dikenal sebagai PT ANTAM, melalui Unit Bisnis Logam Mulia telah lama melakukan pengolahan dan pemurnian emas sejak zaman penjajahan. Unit Bisnis Logam Mulia merupakan hasil nasionalisasi perusahaan milik warga negara Belgia, RT Braakensiek. Saat ini kapasitas terpasang di Unit Logam Mulia dapat memurnikan 75 ton emas/tahun dengan kandungan murni 99,99%. Semua emas murni berlabel LM diakui secara internasional karena sudah terakreditasi oleh *London Bullion Market Association* (LBMA), artinya emas

produksi PT ANTAM dapat diterima di pasar emas dunia dengan premium harga yang sangat baik (Wijanarko, 2013).

Ternyata kapasitas terpasang di PT ANTAM belum terpakai penuh, hanya terpakai 50% atau sekitar 37 ton emas. Input produksi tersebut dikirim oleh 10 perusahaan tambang emas pemegang Kontrak Karya (KK) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Kondisi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan industri pertambangan emas yang saat ini wajib mengekspor emas dan perak dengan kandungan murni, untuk emas 99,99% dan perak 99,95%. Emas dan perak dengan kandungan tersebut dapat diproduksi di Unit Bisnis Logam Pengolahan dan Pemuliaan (UBPP) Logam Mulia PT ANTAM.

Sementara PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dan PT Freeport Indonesia yang melakukan penambangan tembaga juga dapat menghasilkan logam ikutan berupa emas dan perak dalam bentuk lumpur, yang dikenal dengan istilah lumpur anoda. Kandungan emas dalam lumpur anoda ini sekitar 1%. PT Smelting yang mengolah konsentrat dan tembaga dari PT NNT dan PT Freeport Indonesia dalam setahun dapat menghasilkan lumpur anoda sekitar 1800 ton atau artinya emas yang terkandung di dalam lumpur anoda sekitar 18 ton. Selama ini UBPP Logam Mulia mengolah *Dore bullion* dari tambang emas dengan kadar emas lebih dari 5%. *Dore bullion* ini merupakan batangan logam yang mengandung campuran emas dan perak. Sementara *input* dari PT Smelting berupa lumpur anoda dengan kandungan emas kurang lebih 1%. Namun ini tidak menjadi masalah, karena UBPP Logam Mulia memiliki teknologi pemurnian yang dapat merubah lumpur anoda menjadi emas dengan kandungan murni 99,9%. Ke depan diharapkan pasokan lumpur anoda dari perusahaan tambang tembaga dapat dipasok secara kontinu ke UBPP Logam Mulia, sehingga produksi emas nasional dapat meningkat dan kapasitas terpakai PT Antam dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal (Wijanarko, 2013).

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri termaktub bahwa emas merupakan komoditas tambang mineral logam yang wajib memenuhi batasan minimum pengolahan dan atau pemurnian komoditas tambang mineral. Batasan kadar *Aurum* (Au) untuk produk emas yang dimurnikan di dalam negeri adalah sama dengan atau lebih dari 99%, baik bijih emas yang *native* (murni) maupun *associated minerals* (terkandung dalam mineral lain).

Sementara melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 30/PMK.03/2014 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan telah ditetapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) emas dengan dasar pengenaan pajak berupa jumlah harga jual, nilai penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak



yang terutang. Menurut PMK No. 30/2014 penyerahan Emas Perhiasan dan/atau jasa yang terkait dengan Emas Perhiasan oleh Pengusaha Emas Perhiasan terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak ditetapkan sebesar 20% dari harga jual Emas Perhiasan atau nilai penggantian, sehingga pengusaha emas dikenakan PPN terutang menurut PMK No. 30/2014 tersebut.

Untuk memaksimalkan upaya pemanfaatan emas melalui pemenuhan kebutuhan industri emas dalam negeri dan peningkatan daya saing ekspor produk emas, pemerintah juga telah menetapkan Permendag No 46/M-DAG/PER/7/2012 tentang Ketentuan Ekspor Perak dan Emas. Dalam Permendag tersebut diterangkan bahwa eksportir yang mengekspor emas harus memiliki surat persetujuan pelaksanaan ekspor emas berupa Surat Persetujuan Ekspor (SPE) Emas yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan masa berlaku enam bulan. Untuk memperoleh SPE emas, eksportir harus memenuhi persyaratan dengan melampirkan berbagai dokumen termasuk rencana ekspor emas dan Rekomendasi dari Direktur Industri Tekstil dan Aneka, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian.

Selama ini perdagangan emas di Indonesia di kancah internasional terbilang baik, namun untuk mengatasi ketidakpastian perekonomian global yang mempengaruhi harga emas internasional, Indonesia perlu membentuk badan pengelolaan emas nasional. Badan ini bertugas mengatur perdagangan emas nasional termasuk ekspor dan harga yang mengacu ke bursa emas internasional di London. Selain itu, antar instansi pemerintah terkait yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan harus bisa saling berkoordinasi dalam menetapkan strategi ekspor emas ke depan. Diharapkan ekspor produk emas nasional ke depan semakin bervariasi, dan nilai tambah ekspor emas semakin meningkat, namun tetap dapat memenuhi kebutuhan emas dalam negeri.



Indonesia

Peru



Endah Ayu Ningsih dan Wibowo Kurniawan

Saat ini Kementerian Perdagangan secara konsisten membuka akses pasar di negara-negara tujuan ekspor baru sebagai upaya pencapaian target ekspor nasional disamping tetap mempertahankan pasar di negara-negara tujuan ekspor utama. Untuk itu diplomasi perdagangan Indonesia diprioritaskan pada penetrasi pasar baru di tengah situasi pemulihan ekonomi global dan ancaman krisis dunia yang masih mungkin berlanjut. Selama ini pasar non tradisional telah banyak menopang neraca perdagangan Indonesia pada 2012 dan 2013. Pertumbuhan pasar ekspor non tradisional di kawasan Afrika, Eropa (tanpa Uni Eropa) dan Amerika Latin cukup tinggi, pertumbuhan ekspor per tahun selama 2009-2013 masing-masing dengan tren sebesar 18,83% (Afrika), 8,92% (Eropa), dan 0,23% (Amerika Latin). Potensi pasar non tradisional di Amerika Latin juga cukup baik dengan populasi penduduk 562 juta dan total perdagangan saat ini yang mencapai USD 2,5 miliar (BPS, 2014).

Salah satu negara di Amerika Latin yang menjadi negara tujuan ekspor baru adalah Peru. Dalam pertemuan APEC di Vladivostok tahun 2012, Presiden kedua negara sepakat untuk melanjutkan kerjasama perdagangan yang lebih erat. Komitmen ini ditindaklanjuti dengan adanya surat dari Menteri Perdagangan, Luar Negeri dan Pariwisata Republik Peru yang ditujukan kepada Menteri Perdagangan RI pada Juni 2013 agar merealisasikan rencana tersebut. Rencana perdagangan bebas Indonesia-Peru kemudian dibahas kembali pada pertemuan bilateral tingkat menteri di Lima, Peru pada September 2013. Puncaknya, pada pertemuan APEC Ministerial Meeting dan KTM WTO ke-9 di Nusa Dua Bali, Menteri Perdagangan RI dan Menteri Perdagangan Luar

Negeri dan Pariwisata Peru sepakat untuk membentuk tim teknis *Joint Study Group (JSG)* dan menyusun *draft Term of Reference (TOR)* Indonesia Peru *Preferential Trade Agreement (PTA)*.

Melihat hal ini, kerjasama perdagangan bebas Indonesia-Peru berpeluang menjadi agenda nasional karena telah menjadi komitmen para kepala negara. Pertanyaannya kemudian, apakah kerjasama tersebut secara ekonomi layak dilakukan dan akan memberikan manfaat dalam upaya peningkatan ekspor Indonesia?

Potensi Peru sebagai Negara Tujuan Ekspor

Ekonomi Indonesia jauh lebih besar dari Peru dengan PDB 2013 sebesar USD 1,29 triliun bila dibandingkan dengan Peru yang hanya USD 0,34 triliun. Namun PDB perkapita Peru besarnya dua kali lebih tinggi dari Indonesia. Dari sisi populasi, jumlah penduduk Peru hanya 30 juta, sangat kecil jika dibanding dengan total populasi Indonesia yang mencapai 254 juta. Dengan fakta tersebut Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial bagi tujuan ekspor Peru, sementara Peru hanya pasar yang relatif kecil bagi Indonesia. Kedua negara juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang hampir sama, namun Peru dapat menjaga inflasi pada level yang lebih rendah dari Indonesia. Perekonomian Peru tumbuh rata-rata 5,6% selama lima tahun terakhir dengan nilai tukar yang stabil dan inflasi yang rendah. Perkembangan ekonomi yang baik ini sebagian besar dikarenakan tingginya harga internasional bahan logam dan mineral di mana Peru merupakan eksportir utama dunia untuk komoditi tersebut.

Layakkah Perdagangan

Tabel 1. Kondisi Makroekonomi Indonesia dan Peru, 2013

Indikator	Unit	Indonesia	Peru
PDB (PPP) 2013	USD Triliun	1,29	0,34
PDB perkapita (PPP)	USD	5.200	11.100
Pertumbuhan PDB	%	5,3	5,1
Inflasi	%	7,7	2,9
Populasi	Juta orang	254	30
Ekspor	USDMiliar	179	41
Impor	USD Miliar	179	42

	Indonesia	Peru
Produk Ekspor Utama	Mesin dan peralatan mesin, kimia, bahan bakar, bahan pangan	Tembaga, emas, seng, biji besi, perak, minyak bumi, gas alam, kopi, sayuran, buah, tekstil, produk ikan, kimia, produk logam
Produk Impor Utama	Mesin dan peralatan mesin, kimia, bahan bakar, bahan pangan	Bahan bakar, kimia, plastik, mesin, kendaraan, televisi, alat komunikasi, besi dan baja, gandum, jagung, kedelai, kertas, kapas, obat-obatan

Sumber: *CIA Factbook* (2014)

Indonesia dan Peru sama-sama memiliki ketergantungan ekspor dari komoditi sumber daya alam. Ekspor Indonesia lebih pada komoditi pertanian dan perkebunan sedangkan Peru bergantung pada ekspor barang tambang dan mineral. Peru memiliki berbagai sumber daya alam yang sangat penting dalam perekonomiannya berupa mineral di daerah pegunungan dan lahan perikanan dan sangat potensial di wilayah pesisir. Peru juga merupakan produsen terbesar kedua di dunia untuk komoditi perak dan produsen tembaga terbesar ketiga di dunia. Ekspor logam dan mineral Peru menyumbang 60% dari total ekspor negara tersebut. Meskipun kinerja makro ekonomi Peru kuat, ketergantungan pada ekspor mineral dan logam serta kebutuhan

bahan pangan yang harus diimpor membuat perekonomian Peru rentan terhadap fluktuasi harga dunia.

Kinerja Perdagangan Indonesia-Peru

Neraca Perdagangan Indonesia dengan Peru selalu mengalami surplus dengan nilai yang terus meningkat hingga periode Januari-Oktober 2014. Rata-rata pertumbuhan ekspor Indonesia ke Peru selama lima tahun terakhir (2009-2013) sebesar 35%, sementara nilai impor selama lima tahun juga meningkat sebesar 16,64% per tahun. Dengan demikian surplus perdagangan yang terjadi juga terus meningkat dengan pertumbuhan lima tahun sebesar 58,99%. Selama ini perdagangan Indonesia dengan Peru hanya terdiri dari perdagangan non migas, kecuali pada 2012, di mana Indonesia melakukan ekspor migas ke Peru dengan nilai sebesar USD 24 ribu.



Bebas Indonesia-Peru

Tabel 2. Neraca Perdagangan Indonesia-Peru, 2009-2014 (USD Juta)

Uraian	2009	2013	Pertumbuhan per tahun (%) 09-13	Jan-Okt '2013	Jan-Okt '2014	Perubahan (%) 14/13
Ekspor	51,17	178,45	35,36	155	188	20,96
Impor	36,47	51,80	16,64	48	53	10,61
Total Perdagangan	87,64	230,25	29,01	202,8	240,4	18,53
Neraca	14,70	126,65	58,99	107,6	135,1	25,54

Sumber: BPS (2014)

Pada tahun 2013 ekspor Indonesia ke Peru tercatat sebesar USD 178,45 juta. Angka tersebut menempatkan Peru sebagai negara ke-49 dalam negara tujuan ekspor Indonesia. Jenis barang yang diekspor ke Peru masih sangat sedikit dan terkonsentrasi hanya beberapa produk saja. Kontribusi dari 25 produk ekspor terbesar (dalam 6 digit HS) mencapai 78,14%. Beberapa produk juga tidak diekspor secara kontinu setiap tahunnya sehingga

tidak tercatat pertumbuhan rata-rata selama lima tahun 2009-2013. Fakta ini menunjukkan bahwa pasar Peru tidak menjadi tujuan utama eksportir Indonesia.

Ekspor Indonesia ke Peru didominasi oleh produk kertas, hasil olahan karet, kendaraan, alas kaki, dan tekstil. Berikut ini 15 (lima belas) produk ekspor utama Indonesia ke Peru dengan perbandingan antara tahun 2013 dan tahun 2014.

Tabel 3. Ekspor Indonesia ke Peru, 2013-2014 (USD Ribu)

Kode HS	Uraian	Jan-Okt '2013	Jan- Okt '2014	Perubahan (%) 14/13
8418.1	Combined refrigerator-freezers fitted	13.504,12	8.486,47	-37,16
4810.29	Paper and paperboard for writing, printing or other	12.962,74	1.523,89	-88,24
4001.22	Technically specified natural rubber (tsnr	11.015,10	5.267,17	-52,18
8703.23	Passenger motor vehicles with spark-ignition internal	10.382,11	7.783,32	-25,03
8703.22	Passenger motor vehicles with spark-ignition internal	7.532,64	16.539,68	119,57
6403.19	Sports footwear (other than ski footwear) nesoi, with outer soles	6.491,90	4.515,45	-30,44
4802.56	Paper&paperboard, not containing fibres obtained by	6.336,68	7.802,44	23,13
8474.9	Parts of machinery for sorting, screening, separating and	4.585,22	10.857,52	136,79
8521.9	Video recording or reproducing apparatus, other	5.344,14	5.548,57	3,83
1511.9	Palm oil and its fractions, refined but not chemically	5.719,85	41.949,60	633,4
8703.33	Passenger motor vehicles with compression-ignition internal	3.400,88	11.130,39	227,28
6404.19	Footwear, with outer soles of rubber or plastics and uppers	3.248,52	2.382,77	-26,65
6402.19	Sports footwear, other than ski-boots and cross-country	3.594,36	3.650,57	1,56
4809.9	Copying or transfer papers, coated or impregnated,	3.346,22	3.614,04	8
1604.14	Tunas, skipjack and atlantic bonito (sarda spp), prepared	3.209,56	123	-96,17
	Sub total	100.674,04	131.174,88	30,3
	Lainnya	5.4536,42	5.6560,47	37,11
	Total	155.210,46	187.735,35	20,95

Sumber: BPS (2014)

Tahun 2014 setidaknya sembilan produk ekspor utama mengalami peningkatan sehingga memberikan tambahan terhadap total ekspor Indonesia ke Peru. Produk tersebut diantaranya: kendaraan angkutan (HS 8703.22 (naik 119%) dan 8703.33 (227%)), peralatan mesin (HS 8474.90 (136%)), minyak

sawit (HS 1511.90 (633%)), mesin (HS 8874.90 (633%)), tekstil dan alas kaki (6404.11 (58%), 5510.11 (73%)), dan produk kertas (4810.14 (21%), dan 4802.56 (23%)). Sementara itu lima produk utama yang mewakili 30% ekspor Indonesia ke Peru tahun 2013 mengalami penurunan signifikan di antaranya: *refrigerator*

(8418.10 (turun 37%)), kertas (4810.29 (88%)), karet alam (4001.22 (52%)), kendaraan angkutan (8703.23 (25%)), dan alas kaki (6403.19 (30%)).

Total impor Indonesia dari Peru tahun 2013 terkonsentrasi hanya pada beberapa produk. Sebanyak 10 produk dalam HS 6 digit menyumbang 98 % dari total impor. Tiga produk bahkan

menyumbang hampir 90% total impor yaitu makanan ikan (2301.20) menyumbang 40,52%; bahan mineral untuk pupuk (3103.90) menyumbang 35,7%; dan buah anggur (0806.10) menyumbang 11,2%. Berikut ini 10 (sepuluh) besar produk impor Indonesia dari Peru dengan perbandingan data tahun 2013 dan tahun 2014.

Tabel 4. Impor Indonesia dari Peru, 2013-2014 (USD Ribu)

Kode HS	Uraian	Jan-Okt '2013	Jan- Okt '2014	Perubahan (%) 14/13
2301.2	Flours, meals and pellets, of fish or of	17.855,08	12.730,08	-28,7
3103.9	Phosphatic mineral or chemical	18.491,38	11.656,05	-36,96
806.1	Grapes, fresh	5.050,44	19.034,08	276,88
7403.11	Refined copper cathodes and	2.033,12	-	-100
2833.25	Copper sulfate	1.569,88	-	-100
2810	Oxides of boron; boric acids	661,5	829,95	25,46
1801	Cocoa beans, whole or broken, raw or	160,18	3.211,78	1.905,07
8479.89	Machines and mechanical	236,25	-	-100
7907	Articles of zinc, nes.	234,48	348,3	48,54
5501.3	Synthetic filament tow, acrylic or	203,55	228,13	12,08
	Sub total	46.495,86	48.038,37	3,31
	Lainnya	1.123,06	4.631,32	312,38
	Total	47.618,92	52.669,69	10,6

Sumber: BPS (2014)





Secara keseluruhan nilai impor Indonesia dari Peru mengalami kenaikan sebesar 10,6% dari tahun 2013 ke tahun 2014. Kenaikan yang signifikan terjadi pada impor produk Anggur sebesar 276,88 % dan biji coklat sebesar 1.905,07%. Dari sedikitnya jenis produk yang ada pada tabel di atas menunjukkan bahwa perdagangan Indonesia dengan Peru belum mencakup banyak komoditi. Posisi Peru dalam negara asal impor Indonesia hanya berada pada urutan ke-70 dengan pangsa 0,03% dari total impor pada tahun 2013.

Kebijakan Tarif Peru

Tarif impor Peru dibuat berdasarkan pada *Common Tariff Nomenclature of the Member Countries of the Andean Community*. Pada 2013 struktur tarif Peru terdiri dari 7.554 pos tarif pada level 10 digit HS 2012. Angka ini bertambah jika dibandingkan dengan struktur tarif 2007 yaitu sebesar 7.370 pos tarif. Penambahan pos tarif ini diikuti dengan transposisi nomenklatur dan perubahan besaran tarif. Peru telah menurunkan tarifnya dengan rata-rata tarif *Most Favoured Nation* (MFN) yang berlaku dari 8% pada 2007 menjadi 3,2% pada 2013. Tabel 5 berikut ini menunjukkan perubahan struktur tarif Peru pada 2007 dibandingkan 2013.

Tabel 5. Struktur Tarif MFN 2007 dan 2013 (%)

Deskripsi	2007	2013
Jumlah Pos Tarif	7.370	7.554
Tarif Non-Advalorem (% dari total Pos tarif)	0,6	0,6
Tarif Non-Ad valorem tanpa ad-valorem equivalents (% dari total Pos tarif)	6	0,0
Kuota Tarif (% of all tariff lines)	0,0	0,0
Pos Tarif 0 (% of all tariff lines)	43,6	55,3
Pos tarif diatas 0 (%)	14,1	7,2
Rata-rata (%)	8,0	3,2
Produk pertanian	12,9	4,3
Produk di luar pertanian (including petroleum)	7,2	3,1
Bahan baku	9,6	2,9
Produk setengah jadi	7,1	3,1
Produk jadi	8,2	3,4

Sumber: *Trade Policy Review Mechanism* (TPRM) Peru (2014)

Peru juga memberikan proteksi pada produk-produk pertanian (daging, produk susu, buah dan sayuran dan sereal) dengan memberikan tarif yang lebih tinggi dibandingkan produk non pertanian. Selain itu Peru telah memiliki kebijakan tarif rendah untuk barang modal dan barang-barang bahan baku sejak 2007 sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi. Peru juga melakukan pengurangan tarif secara *unilateral* dengan tujuan membuat negaranya lebih kompetitif. Selain melakukan liberalisasi unilateral, Peru juga meningkatkan fasilitasi perdagangan, antara lain dengan meningkatkan infrastrukturnya.

Impor Peru dari Indonesia tahun 2013 berdasarkan data *Trademap* tercatat sebesar USD 188,9 juta yang mewakili 0,5% impor Peru dari dunia. Dari angka tersebut USD 56,6 juta telah memperoleh tarif 0% sedangkan 79,3 juta masih mengalami tarif 6% dan USD 53,1 juta mendapat tarif 11%. Secara persentase terdapat 70% impor Peru dari Indonesia yang masih dikenakan tarif.

Tabel 6. Perdagangan Indonesia dalam Struktur Tarif Peru

Tingkat Tarif (%)	Jumlah Pos Tarif*	Impor Peru dari Indonesia 2014**	
		(USD 000)	(%)
0	4.180	56.553	29,94
6	2.535	79.263	41,96
11	792	53.063	28,09
Tarif Spesifik	47	-	0,00
Jumlah	7.554	188.879	100,00

Sumber: * *Tariff Analysis Online*, WTO (2013); ***Trademap* (2014), diolah



Kesesuaian Struktur Perdagangan Indonesia dan Peru

Keberhasilan kerja sama perdagangan bebas baik itu berupa *Preferential Trade Agreement (PTA)* maupun *Free Trade Agreement (FTA)* antara Indonesia dan Peru dapat diprediksi dengan menggunakan *Trade Complementarity Index (TCI)*. Indeks TCI mengukur apakah kerjasama PTA dapat layak dilakukan dengan kondisi tingkat kesesuaian struktur ekspor Indonesia dengan struktur impor Peru (dan sebaliknya) yang ditunjukkan oleh indeks tersebut. Indeks TCI dihitung dari tahun 2009 hingga tahun 2012 sesuai dengan ketersediaan data untuk kedua negara dan kalkulasi indeks tersebut didasarkan pada level HS 6 digit.

Gambar 1 menunjukkan indeks TCI untuk struktur ekspor Indonesia ke dunia dengan struktur impor Peru dari dunia, dan struktur ekspor Peru ke dunia dengan struktur impor Indonesia dari dunia. Dari gambar tersebut diketahui bahwa tingkat kesesuaian perdagangan antara Indonesia dan Peru masih sangat kecil terutama jika dilihat dari prospektif Peru, dimana produk ekspor Peru tahun 2010 hanya memiliki kecocokan 22,69% dari struktur produk yang diimpor Indonesia dan sedikit meningkat pada tahun 2010 menjadi 24,12%. Dari indeks tersebut apabila nantinya akan dilaksanakan kerjasama perdagangan antara kedua negara, maka tidak akan menghasilkan peningkatan ekspor atau impor yang signifikan antara kedua negara. Sebaliknya kesesuaian struktur ekspor Indonesia terhadap struktur impor Peru dapat dikatakan cukup baik di mana pada tahun 2010 mencapai 49,02% dan pada tahun 2013 sebesar 51,06%. Namun demikian rendahnya tingkat kesesuaian struktur perdagangan antara kedua negara menunjukkan bahwa kedua negara tidak saling melengkapi dalam perdagangan.

Gambar 1. Trade Complementarity Index Indonesia-Peru.

Keterangan: TCI dihitung berdasarkan Kode HS 2007 dalam level 6 digit

Sumber : *World Integrated Trade Solution* (2014), diolah

Layakkah?

Perdagangan bilateral yang telah ada antara Indonesia-Peru selama ini belum cukup besar dan intens yang antara lain dapat dilihat dari nilai perdagangan kedua negara. Potensi pasar Peru relatif sangat kecil dibanding potensi pasar Indonesia sebagai negara tujuan ekspor Peru. Sementara itu ekonomi Peru juga sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi dunia. Tingkat tarif Peru relatif sudah rendah dan Peru telah melakukan liberalisasi secara unilateral yang bertujuan mendorong pertumbuhannya. Selain itu potensi manfaat perdagangan bebas antara Indonesia dan Peru juga masih perlu dianalisis lebih lanjut. Hal ini mengingat kesesuaian struktur ekspor dan impor masing-masing negara masih sangat rendah sehingga perdagangan bebas yang akan dilakukan tidak menjamin akan meningkatkan perdagangan kedua negara karena perbedaan kemampuan penawaran dan permintaan keduanya. Dengan demikian sudah seleyaknya bila potensi Peru sebagai negara target mitra perdagangan bebas Indonesia perlu dikaji lebih mendalam lagi.

Shanghai, Gerbang

Meraih Pasar RRT

Septika Tri Ardiyanti



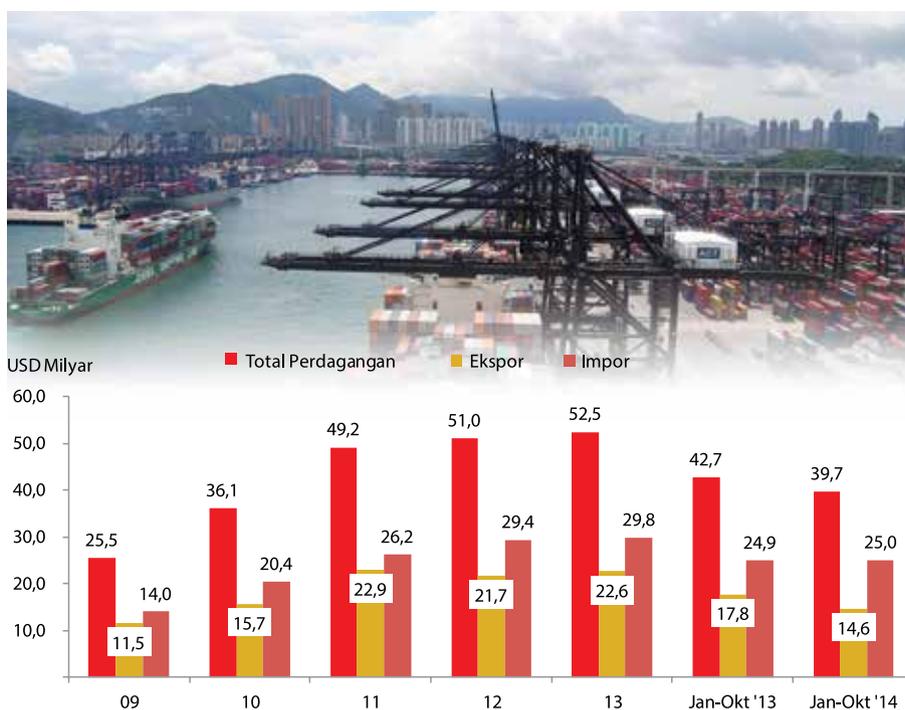
Republik Rakyat Tiongkok (RRT) merupakan negara ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat dengan GDP per kapita mencapai USD 7 ribu di tahun 2013 atau meningkat sebesar 12,3% dibandingkan tahun sebelumnya (*Year-on-Year/ YoY*) (IMF, 2014). Pesatnya pertumbuhan RRT tidak terlepas dari kebijakan perdagangan luar negerinya yang dikenal sebagai "*The Giant Export Oriented Country*". RRT merupakan negara dengan total perdagangan luar negeri terbesar di dunia. Selama tahun 2013, total perdagangan RRT mencapai USD 4.001,5 miliar (naik 7,4% YoY), dan menempati urutan pertama eksportir dunia dan urutan ke dua importir dunia di bawah Amerika Serikat dengan pangsa masing-masing sebesar 13,3% (USD 2.209,01 miliar) dan 10,4% (USD 1.792,5 miliar) pada tahun yang sama (UN *Comtrade*, 2014). Bahkan, di tengah krisis global yang melanda negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat yang dampaknya

masih terasa hingga kini, IMF memprediksi perekonomian RRT di tahun 2015 akan tetap tumbuh sebesar 6,8%, jauh lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan Eropa yang hanya sebesar 3,6% dan 1,2%.

RRT juga memiliki populasi terbesar di dunia, yaitu lebih dari 1,4 miliar jiwa di tahun 2013. Jumlah kelompok kelas menengah RRT juga terus mengalami peningkatan dan diperkirakan akan mencapai 560 juta jiwa atau 40% dari total populasi RRT pada tahun 2020 (Kharas dan Gertz, 2010). Hal tersebut menjadikan RRT sebagai *massive market* yang sangat penting dan potensial bagi Indonesia. Luas daratan RRT terbesar kedua di dunia dengan luas kurang lebih 9,6 juta km² (*World by Map*, 2014). Secara geografis RRT dapat dibagi menjadi tiga wilayah, yaitu bagian timur yang merupakan pusat perekonomian dan akses pasar utama lalu lintas perdagangan, bagian tengah dan utara serta bagian barat.

Kinerja Perdagangan Indonesia-RRT

RRT merupakan negara mitra dagang utama Indonesia. Pertumbuhan total perdagangan antara Indonesia dan RRT selama tahun 2009-2013 juga mengalami tren positif dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 19,6% per tahun didukung oleh pertumbuhan ekspor 18,2% per tahun dan impor 20,7%. Selama Januari-Oktober 2014 total perdagangan Indonesia dan RRT mencapai USD 39,7 miliar, turun 7,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang terdiri dari ekspor sebesar USD 14,6 miliar (turun 17,6% YoY) dan impor sebesar USD 25,0 miliar (naik 0,43%) (Grafik 1). Penurunan tersebut disebabkan oleh turunnya permintaan di pasar dunia.



Grafik 1. Kinerja Perdagangan Indonesia-RRT

Sumber: BPS (2015), diolah

RRT menjadi *top market* ekspor non migas Indonesia pada periode Januari-Oktober 2014 dengan nilai ekspor non migas mencapai USD 13,8 miliar, turun 17,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Komoditi non migas yang menjadi unggulan ekspor Indonesia ke RRT didominasi oleh barang-barang tambang dan komoditas seperti batubara, CPO dan produk turunannya serta *pulp*. Bahkan, ekspor barang yang termasuk ke dalam lima produk ekspor utama (HS 10 digit)

telah mencapai 41,7% dari total ekspor Indonesia ke RRT. Selain sebagai *top-market* ekspor Indonesia, RRT juga menduduki peringkat pertama negara asal impor non migas Indonesia dengan nilai impor mencapai USD 24,9 miliar, meningkat sebesar 1,0% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Produk yang paling banyak di impor Indonesia dari RRT adalah barang-barang elektronik seperti telepon genggam dan laptop.

Tabel 1. Komoditas Perdagangan Indonesia-RRT Melalui Shanghai

HS	Uraian	USD Miliar			HS	Uraian	USD Miliar		
		2013	JAN-OKT				2013	JAN-OKT	
			2013	2014				2013	2014
	Ekspor Non Migas	21.281,58	16.711,47	13.776,13		Impor Non Migas	29.570,45	24.672,08	24.916,11
2702100000	Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi	1.618,35	1.191,61	1.804,32	8517120000	Telepon untuk jaringan selular atau jaringan tanpa kabel lainnya	1.595,12	1.319,83	1.548,83
1511909010	Dari minyak kelapa sawit, dimurnikan, dijemihkan, dan dihilangkan baunya	1.724,64	1.235,27	1.411,31	84711302000	Laptop termasuk notebook dan subnotebook	971,37	799,75	603,88
2701190000	Batubara lainnya	2.517,29	2.013,29	952,41	8517610090	Aparatus lainnya untuk transmisi (Stasiun induk lainnya)	67,80	63,56	364,44
4703290000	Chemical wood pulp dari jenis pohon bukan jenis konifera	1.098,10	896,49	883,92	703209000	Bawang putih, segar / dingin selain untuk propagasi	360,66	316,88	299,14
2701121000	Batubara bahan bakar	1.416,90	1.158,39	697,88	8529909400	Panel untuk layar datar	317,23	278,30	295,69
	Subtotal	8.375,28	6.495,05	5.749,85		Subtotal	3.312,18	2.778,33	3.111,97
	Lainnya	12.906,31	10.216,42	8.086,29		Lainnya	26.258,27	21.893,75	21.804,14

Sumber: BPS (2015), diolah

Shanghai dalam Kinerja Perdagangan RRT

Shanghai merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian timur RRT dan telah berkembang menjadi salah satu kota metropolitan terbesar di dunia serta berevolusi menjadi pusat perekonomian RRT. Shanghai juga menjadi kota dengan jumlah populasi terbesar di RRT pada tahun 2013 dengan populasi 24,1 juta jiwa. Letak geografis yang sangat strategis dan berdekatan dengan sungai Yangtze, menjadikan pelabuhan laut Shanghai sebagai salah satu pelabuhan yang ramai dan cukup sibuk. Menurut data dari situs Majalah Dermaga yang dirilis pada bulan Mei 2014, *Port of Shanghai* menduduki peringkat pertama pelabuhan yang terpadat dan memiliki kontainer terbesar di dunia. Sedangkan peringkat ke dua diduduki oleh pelabuhan Ningbo-Zhoushan yang terletak di Provinsi Zhejiang, RRT dan peringkat ke tiga diduduki oleh pelabuhan Singapura. Situs tersebut juga menyebutkan sejak tahun 2010 Shanghai telah menggeser posisi Singapura. Pelabuhan Shanghai menangani 29.050.000 *The Twenty-foot Equivalent Unit* (TEUs), ukuran yang sering digunakan untuk menggambarkan kapasitas kapal kontainer dan terminal peti kemas. Jumlah ini setengah juta lebih besar dibandingkan

dengan pelabuhan Singapura. Bahkan, tahun 2012, pelabuhan Shanghai mencatat rekor sejarah dengan menangani lebih dari 32 juta TEUs.

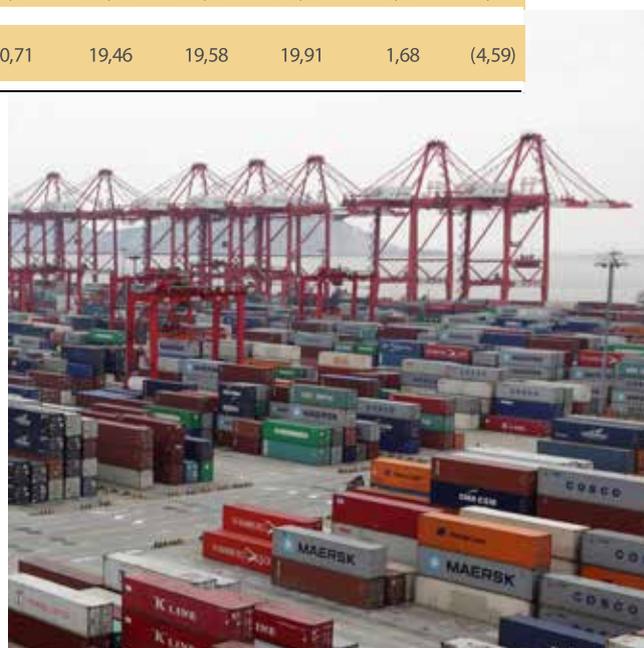
Selama Januari-November 2014, total perdagangan RRT melalui pelabuhan Shanghai mencapai USD 776,5 miliar, naik 5,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Total perdagangan tersebut terdiri dari ekspor sebesar USD 477,2 miliar (naik 4,5% YoY) dan impor sebesar USD 299,4 miliar (naik 6,4% YoY). Hampir 20% kinerja perdagangan luar negeri RRT dilakukan melalui pelabuhan yang terdapat di Shanghai. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata kontribusi perdagangan lewat pelabuhan Shanghai sebesar 21,8% terhadap total ekspor, walaupun tren pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar 4,6% per tahun. Menurut data *Shanghai International Shipping Institute* (SISI) tahun 2014, penurunan tersebut juga dialami oleh hampir semua pelabuhan di RRT akibat melambatnya pertumbuhan perekonomian RRT. Melihat kontribusinya yang cukup besar terhadap kinerja perdagangan RRT, Shanghai tidak diragukan memiliki peran yang sangat krusial dan menjadi akses pasar utama bagi lalu lintas perdagangan di pasar RRT (Tabel 2).

Tabel 2. Kinerja Perdagangan RRT Melalui Pelabuhan Shanghai

Uraian	USD Miliar					Jan-Nov '2013	Jan-Nov '2014	Perub. (%) '14/13	Trend (%) '09-13
	2009	2010	2011	2012	2013				
China									
Ekspor	1.202,05	1.578,44	1.899,28	2.050,11	2.210,66	2.002,92	2.115,71	5,63	15,95
Impor	1.003,89	1.393,91	1.741,43	1.817,34	1.949,30	1.767,20	1.785,20	1,02	17,26
Total Perdagangan	2.205,94	2.972,35	3.640,71	3.867,45	4.159,96	3.770,12	3.900,91	3,47	16,56
Shanghai									
Ekspor	324,86	423,06	499,60	491,10	499,02	456,79	477,16	4,46	10,60
Impor	190,17	261,13	312,20	309,97	310,39	281,34	299,40	6,42	12,20
Total Perdagangan	515,04	684,19	811,81	801,07	809,42	738,13	776,55	5,20	11,20
Peran Thdp Total Perdagangan (%)	23,35	23,02	22,30	20,71	19,46	19,58	19,91	1,68	(4,59)

Sumber: GTIS, 2015 (diolah)

Selama ini perdagangan RRT dan Indonesia juga telah banyak dilakukan melalui pelabuhan Shanghai. Pada Januari-November 2014, total perdagangan antara RRT dan Indonesia yang melalui pelabuhan Shanghai tercatat sebesar USD 11,8 miliar (meningkat 1,0% YoY), terdiri dari nilai ekspor RRT ke Indonesia sebesar USD 8,5 miliar (0,1% YoY) dan impor RRT dari Indonesia sebesar USD 3,3 miliar (naik 3,5% YoY). Pelabuhan Shanghai juga memiliki peran yang besar terhadap kinerja perdagangan Indonesia dan RRT. Selama tahun 2009-2013, pelabuhan Shanghai memegang peranan antara 18% hingga 22%. Pada periode Januari-November 2014, peranannya mencapai 20,3% meningkat 7,8% dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya (Tabel 3).



Tabel 3. Kinerja Perdagangan RRT-Indonesia Via Shanghai

Uraian	USD Miliar					Jan-Nov '2013	Jan-Nov '2014	Perub. (%) '14/13	Trend (%) '09-13
	2009	2010	2011	2012	2013				
Ekspor	14,74	21,97	29,26	34,29	36,94	33,66	35,32	4,92	25,64
Impor	13,54	20,76	31,32	32,03	31,48	28,09	22,54	(19,75)	23,63
Total perdagangan	28,28	42,73	60,58	66,32	68,42	61,75	57,86	(6,30)	24,69
-Melalui Shanghai									
--Ekspor	4,40	6,37	8,19	8,49	9,32	8,50	8,50	0,08	19,56
--Impor	1,78	2,04	3,17	3,51	3,53	3,14	3,25	3,47	21,07
--Total Perdagangan	6,18	8,41	11,36	11,99	12,85	11,64	11,75	0,99	19,94
Peran Thdp Total Perdagangan (%)	21,86	19,69	18,75	18,08	18,78	18,85	20,32	7,79	(3,81)

Sumber: GTIS, 2015 (diolah)

mesin dan peralatan listrik (HS 85); karet alam (HS 40); pulp dan waste paper (HS 47) serta kayu dan barang dari kayu (HS 44) (Tabel 4).

Tabel 4. Komoditas Perdagangan Indonesia-RRT Melalui Shanghai

HS	Uraian	USD Miliar			Perub. (%) '14/13	HS	Uraian	USD Miliar			Perub. (%) '14/13
		2013	Jan-Nov '13	Jan-Nov '14				2013	Jan-Nov '13	Jan-Nov '14	
	Total Impor dari Indonesia Via Shanghai	3,53	3,14	3,25	3,47		Total Ekspor Indonesia Via Shanghai	9,32	8,50	8,50	0,08
27	Bahan Bakar Mineral	0,78	0,68	0,44	(35,40)	84	Mesin-mesin/Pesawat Mekanik	2,61	2,39	2,28	(4,85)
85	Mesin/peralatan listrik	0,33	0,30	0,35	15,95	85	Mesin/peralatan listrik	1,32	1,18	1,26	6,35
40	Karet dan Barang dari Karet	0,25	0,23	0,13	(43,86)	73	Benda-benda dari Besi dan Baja	0,44	0,39	0,49	25,20
47	Bubur Kayu/Pulp	0,24	0,22	0,15	(34,36)	52	Kapas	0,41	0,37	0,35	(4,00)
44	Kayu, Barang dari Kayu	0,20	0,19	0,27	46,28	29	Bahan kimia organik	0,39	0,36	0,34	(5,04)
	Subtotal	1,81	1,63	1,34	(17,74)		Subtotal	5,17	4,70	4,72	0,53
	Lainnya	1,72	1,52	1,92	26,18		Lainnya	4,15	3,80	3,78	(0,48)

Sumber: GTIS, 2015 (diolah)

Kontribusi yang cukup besar dalam perdagangan RRT juga tak luput dari peran Shanghai sebagai salah satu pusat industri utama, terutama untuk sektor industri berat (*heavy industries*). Industri berat bahkan menyumbang sebesar 78% dari PDB Shanghai di tahun 2009. Beberapa kawasan industri yang terdapat di Shanghai antara lain *Shanghai Hongqiao Economic and Technological Development Zone*, *Jinqiao Export Economic Processing Zone* dan *Minhang Economic and Technological Development Zone*. Industri berat yang terdapat di Shanghai antara lain industri besi dan baja *Baosteel group* dan produsen peralatan berat Shanghai *Zhenhua Heavy Industry Co., Ltd. (ZPMC)* (Supercity, 2015). Selain memiliki peran penting terhadap perdagangan dan sebagai pusat industri berat, Shanghai juga sering menjadi tuan rumah pada perhelatan festival dan acara-acara internasional. Salah satunya adalah *World Expo* yang

pernah diadakan pada tahun 2010 yang lalu.

Lokasi Shanghai yang sangat strategis dengan populasi yang besar menjadikan kota ini sebagai sentra sektor industri berat (*heavy industries*) dan kota bisnis modern yang memegang kunci penting bagi pertumbuhan perekonomian di negeri "Tirai Bambu". Memiliki pelabuhan dengan kapasitas kontainer terbesar dan tersibuk di dunia, Shanghai muncul sebagai pintu gerbang utama Indonesia untuk dapat memasuki pasar RRT. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan potensi Shanghai dan peluang Indonesia dalam meningkatkan ekspor di pasar RRT, pembukaan kantor Pusat Promosi Perdagangan Indonesia (*Indonesian Trade Promotion Center/ITPC*) di Shanghai merupakan salah satu langkah tepat bagi pemerintah yang harus segera direalisasikan guna mendukung pencapaian target peningkatan ekspor tiga kali lipat di tahun 2019.

Komoditi ekspor RRT ke Indonesia melalui pelabuhan Shanghai didominasi oleh produk mesin-mesin dan pesawat mekanik (HS 84); mesin dan peralatan listrik (HS 85); Barang-barang dari besi dan baja (HS 73); Kapas, benang dan kain (HS 52) dan pupuk organik (HS 29). Sementara komoditi impor RRT dari Indonesia yang melalui pelabuhan Shanghai didominasi oleh barang tambang (HS 27);



Mendongkrak Nilai Ekspor TPT Indonesia melalui *Batik*

Maria Stefani Endang

Pemerintahan baru melalui Program Nawacita berkomitmen meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing ekonomi di pasar internasional. Komitmen tersebut dibangun dengan semangat untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Untuk mendukung program tersebut, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel memandang perlunya produk berdaya saing tinggi untuk memenangkan kompetisi di pasar domestik maupun global. Produk berdaya saing tinggi tersebut dapat tercipta melalui peran desain produk kreatif khususnya bagi produk industri kecil dan menengah.

Batik yang merupakan budaya asli Indonesia dengan daya kreasi yang tinggi merupakan salah satu produk yang berpotensi sebagai komoditi yang diharapkan mampu mendongkrak nilai ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Melalui revitalisasi industri kecil dan menengah dan penguatan batik sebagai “Warisan Budaya Manusia yang tak Berwujud” (*Intangible Cultural Heritage of Humanity*) oleh UNESCO pada 2009 di Abu Dhabi Uni Emirat Arab, batik berpeluang besar menjadi salah satu ikon *national branding* untuk mempromosikan Indonesia ke seluruh dunia.

Berdasarkan data BPS (2014), permintaan batik Indonesia di pasar dunia menunjukkan peningkatan yang signifikan pasca penguatan batik Indonesia oleh UNESCO. Nilai ekspor produk batik meningkat dari USD 23 juta pada 2009 menjadi USD 289 juta tahun 2013 atau mengalami pertumbuhan lebih dari 100% setiap tahunnya. Neraca perdagangan pakaian jadi maupun barang jadi tekstil batik selain pakaian jadi juga tumbuh masing-masing sebesar 105% dan 560% sehingga secara keseluruhan menunjukkan tren positif (Tabel 1). Dengan angka ini, industri batik menyumbang sekitar 10% terhadap kinerja perdagangan produk garmen nasional. Dari sisi struktur, ekspor batik Indonesia hingga saat ini masih didominasi oleh 90% ekspor pakaian jadi dan sisanya 10% oleh barang jadi tekstil batik selain pakaian jadi.

Tabel 1. Neraca Perdagangan Batik Indonesia Periode, 2009-2013

HS	URAIAN	NILAI (USD RIBU)					PERUB (%) 13/12	TREN (%) 09-13
		2009	2010	2011	2012	2013		
EKSPOR		23.752	22.291	5.884	278.406	289.054	3,82	112,18
62	Pakaian Jadi Batik	23.706	22.252	5.300	252.246	268.440	6,42	107,13
63	Barang Jadi Tekstil Batik selain Pakaian Jadi	46	39	584	26.161	20.613	(21,20)	549,77
IMPOR		169	43	38	14.870	17.804	0,02	0,36
62	Pakaian Jadi Batik	149	41	36	7.322	11.574	(0,19)	1,63
63	Barang Jadi Tekstil Batik selain Pakaian Jadi	20	2	2	7.548	6.230	8,29	0,11
NERACA		23.583	22.248	5.846	263.537	271.250	2,93	108,69
62	Pakaian Jadi Batik	23.557	22.211	5.264	244.924	256.867	4,88	105,00
63	Barang Jadi Tekstil Batik selain Pakaian Jadi	26	37	582	18.613	14.383	(22,73)	560,32

Sumber: BPS (2014), diolah Puska Daglu

Kinerja Ekspor Produk Batik Indonesia

Selama tahun 2009-2013, produk batik yang mengalami peningkatan nilai ekspor adalah *men/boys' anorak, wind-cheaters/jackets of batik* (HS 6201930010), yang meningkat

dari USD 83 ribu pada tahun 2009 menjadi USD 133 juta pada 2013 sehingga menjadi penghasil nilai ekspor terbesar batik atau sekitar 46% dari total nilai ekspor. Berada di peringkat berikutnya berturut-turut adalah produk *women/girls' trousers, bib&brace*



overall breeches, shorts of batik (HS 6204630010) yang nilai ekspornya tahun 2013 mencapai USD 64 juta, women/girls' anorak, wind-cheater/jackets of batik (HS 6202930010) sebesar USD 31 juta, toilet, kitchen linen, of terry towelling/similar terry fabrics batik, of cotton (HS 6302600010) sebesar USD 18 juta, men/boys' swimwear of batik (HS 6211110010) sebesar USD 17 juta dan women/girls' overcoats, raincoats,

car-coats, capes of batik (HS 6202130010) sebesar USD 16 juta. Dari keenam produk tersebut toilet, kitchen linen, of terry towelling /similar terry fabrics batik, of cotton (HS 6302600010) dan Men/boys' swimwear of batik (HS 6211110010) masing-masing mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2.963% dan 1.292%, karena permintaan dunia yang meningkat (Tabel 2).

Tabel 2. Ekspor Batik Menurut HS, 2009-2014 (Jan-Okt)

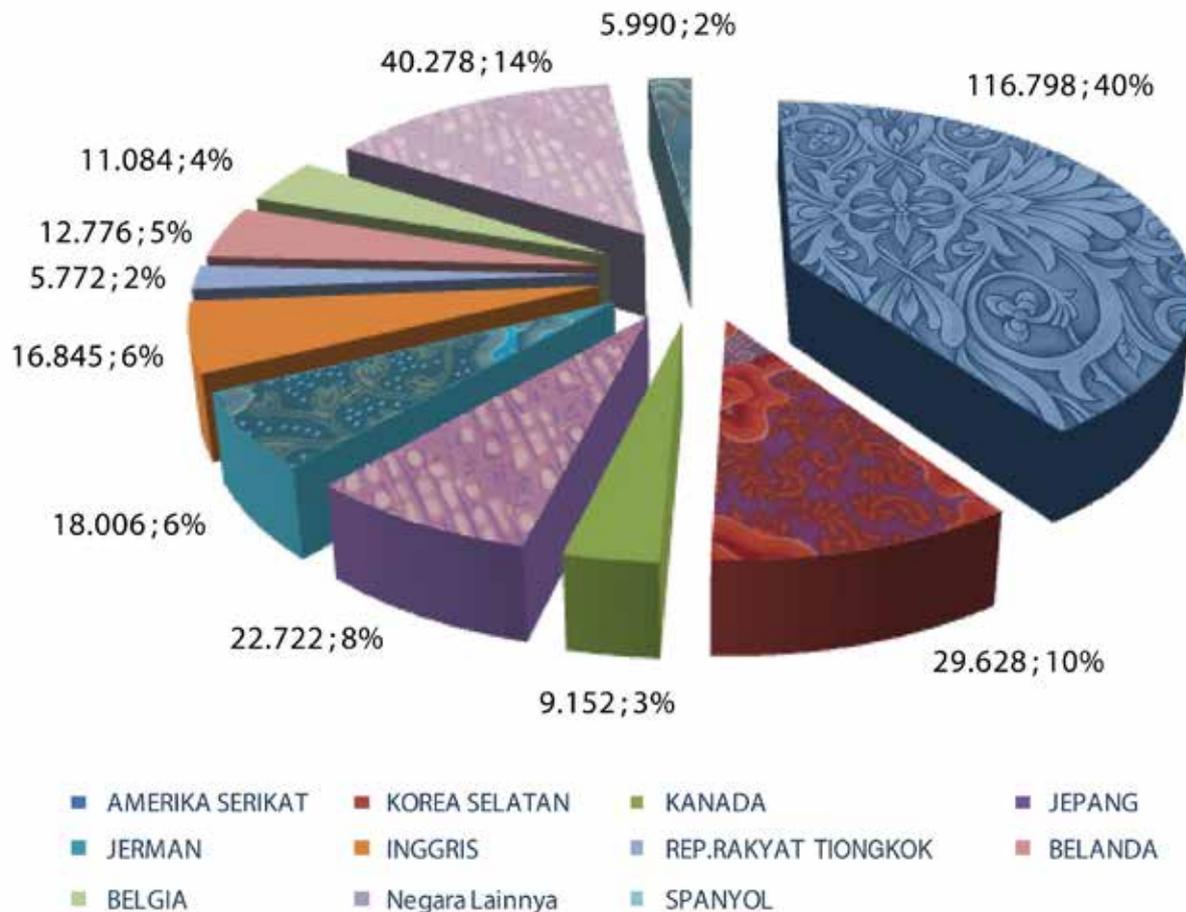
NO	HS / URAIAN	NILAI : (USD RIBU)						Perub. % 14/13	Pangsa (%) 2013	Tren (%) 09-13	
		2009	2010	2011	2012	2013	JAN-OKT				
							2013				2014
1	6201930010 (Men/boys' anorak, wind-cheaters/ jackets of batik)	83	330	257	158.627	133.572	114.071	156.945	37,59	46,21	711,06
2	6204630010 (Women/girls' trousers, bib&brace overall breeches, shorts of batik)	22.444	20.750	4.338	49.458	64.123	54.998	47.921	(12,87)	22,18	34,56
3	6202930010 (Women/girls' anorak, wind-cheater/ jackets of batik)	386	625	82	21.310	31.612	27.957	35.364	26,49	10,94	243,60
4	6302600010 (Toilet, kitchen linen, of terry towelling /similar terry fabrics batik, of cotton)	0	4	0	23.364	18.794	16.389	16.631	1,48	6,50	2.963,25
5	6211110010 (Men/boys' swimwear of batik)	0	156	40	12.885	17.078	13.701	19.755	44,19	5,91	1.292,84
6	6202130010 (Women/girls' overcoats, raincoats, car- coats, capes of batik)	555	115	3	6.008	16.219	11.158	12.210	9,43	5,61	191,66
	HS Batik Lainnya	283	311	1.164	6.754	7.656	6.524	3.499	(46,37)	2,65	163,01
	Total Batik	23.752	22.291	5.884	278.406	289.054	244.797	292.325	19,42	100,00	112,18

Sumber: BPS (2015), diolah Puska Daglu

Berdasarkan negara tujuan ekspor, Amerika Serikat menempati posisi pertama dengan pangsa pasar mencapai 40,97% dari total ekspor produk batik Indonesia. Disusul berikutnya adalah Korea, Jepang, Jerman, Inggris, dan Belanda yang mengalami peningkatan signifikan selama periode 2009-2013 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun lebih dari 400% (Gambar 1).

Selain pasar utama tersebut, dalam upaya peningkatan ekspor perlu dikembangkan ekspor batik ke pasar non

tradisional potensial seperti Hongkong, Uni Eropa, Timur Tengah dan Australia. Meskipun saat ini pangsa pasarnya masih kecil (sekitar 1%), namun sangat potensial untuk dikembangkan, mengingat pertumbuhan ekspor selama periode 2009-2013 ke negara-negara tersebut cukup tinggi dengan rata-rata per tahun tumbuh lebih dari 150%. Hal ini mengindikasikan adanya permintaan akan produk batik yang cukup tinggi di negara-negara tersebut.



Gambar 1. Negara Tujuan Ekspor Utama Batik Indonesia 2013.

Sumber: BPS (2014), diolah Puska Daglu



Desain batik yang spesifik, kualitas jahitan yang bagus dan kreativitas pengrajin batik merupakan salah satu daya pendorong adanya peningkatan nilai ekspor dan menunjukkan batik Indonesia mampu bersaing dengan batik asal Tiongkok dan Malaysia. Salah satu keunggulan daya saing batik asal Indonesia adalah ciri khas ornamen desain lukisan batik yang berbeda dari setiap daerah di Indonesia. Saat ini sentra produksi batik masih bertumpu di pulau Jawa dan Bali. DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali adalah daerah penyumbang utama ekspor batik Indonesia dengan nilai ekspor pada tahun 2013 masing-masing sebesar USD 251 Juta; USD 26 Juta; USD 7 juta; dan USD 2,7 Juta.

Tabel 3. Realisasi Ekspor Batik Indonesia, 2009-2013

NO	PROPINSI TUJUAN	NILAI CIF : (USD RIBU)					PERUB (%)	TREN (%)
		2009	2010	2011	2012	2013	13/12	09-13
	TOTAL BATIK	23.752	22.291	5.884	278.406	289.054	3,82	112,18
1	D K I JAKARTA	21.242	19.494	4.637	254.557	251.874	(1,05)	112,02
2	JAWA TENGAH	2.160	2.450	796	17.359	26.774	54,23	101,23
3	JAWA TIMUR	22	23	10	3.848	7.624	98,15	436,19
4	B A L I	320	306	427	2.574	2.740	6,43	90,08
5	KEPULAUAN RIAU	-	0	-	59	41	(30,91)	-
6	KALIMANTAN TIMUR	2	13	1	0	1	179,29	(39,74)
7	SUMATERA UTARA	0	3	2	0	0	(15,40)	(14,68)
8	NUSA TENGGARA TIMUR	1	0	0	0	0	6,88	(2,30)
9	JAWA BARAT	-	-	-	0	0	(89,10)	-
10	LAMPUNG	-	-	-	-	0	-	-
11	NANGROE ACEH DARUSALAM	-	-	-	-	-	-	-
12	R I A U	-	-	-	-	-	-	-
13	D.I. YOGYAKARTA	4	2	12	-	-	-	-
14	KALIMANTAN TENGAH	-	-	-	-	-	-	-
15	SULAWESI SELATAN	-	-	-	8	-	(100,00)	-

Sumber: BPS (diolah Puska Daglu), 2014

Tantangan Industri Batik Tanah Air

Tantangan yang dihadapi industri batik Indonesia dalam pengembangan produksi antara lain Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini generasi pembatik umumnya sudah berusia di atas 40 tahun, sehingga perlu upaya khusus untuk menarik minat usia produktif menekuni industri batik. Selain SDM, masalah lain yang juga harus menjadi perhatian pemerintah adalah daya saing, khususnya daya saing teknologi di mana usia mesin industri sebagian besar (sekitar 75%) berusia 20 tahun-an sehingga membutuhkan peremajaan mesin agar mampu bersaing di pasar internasional dan domestik yang semakin ketat. Para pengusaha industri batik juga belum melakukan perbaikan sistem dan teknik produksi agar lebih produktif dan menghasilkan mutu yang sama pada setiap lembar kain batik (Kemenperin dan Suara Pembaruan, 2009). Pemakaian zat warna alam juga masih belum maksimal dalam produksi batik di tanah air. Sementara itu, dari sisi ketersediaan bahan baku sutera, jumlahnya masih kurang dari permintaan pasar sehingga, serat dan benang sutera masih tergantung pada impor.

Saat ini pemerintah juga belum serius melakukan promosi dan pemasaran produk batik Indonesia dengan mengangkat batik Indonesia sebagai *high fashion* dunia. Padahal negara produsen batik semakin meluas seperti Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, India, Afrika Selatan dan Polandia. Apalagi

negara pesaing ini kemudian banyak meniru motif batik Indonesia karena perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia belum maksimal. Dengan demikian masih banyak tantangan bagi industri batik di tanah air.

Mengingat batik sebagai warisan budaya dunia milik Indonesia dan batik merupakan salah satu industri padat karya yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan Indonesia melalui ekspor, maka pemerintah perlu melindungi, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya ini dengan menjadikan batik sebagai salah satu entitas budaya dan pengembangan ekonomi Indonesia. Peran pemerintah sangat diharapkan dalam membantu mempromosikan dan kelangsungan usaha industri batik di Indonesia, salah satunya dengan memberi fasilitas pada para pelaku usaha batik untuk ikut serta pada pameran-pameran baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dengan keikutsertaan pelaku usaha batik di pameran internasional diharapkan dapat terjadi kontak dagang dengan *buyers* yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan ekspor non migas Indonesia di pasar internasional.

Selain itu, pemerintah juga perlu mendorong agar para pelaku usaha batik melakukan standarisasi produknya. Standardisasi merek dilakukan dengan membangun satu ekuitas merek batik Indonesia untuk dipasarkan baik ditingkat regional maupun di tingkat internasional sehingga produk batik menjadi lebih berkualitas dan berdaya saing.

Layakkah Handphone Masuk Kategori Barang Modal?



Slamet Sutomo

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2015), dalam suatu leaflet dengan judul 'Masih Layakkah Handphone Masuk Kategori Barang Modal?' mempertanyakan kelayakan memasukkan telepon genggam (*handphone* atau HP) sebagai barang modal. Hal ini dipertanyakan mengingat bahwa penggunaan HP saat ini sudah sangat variatif, tidak hanya digunakan oleh para pelaku bisnis untuk komunikasi bisnis, tetapi juga oleh hampir sebagian besar masyarakat sebagai salah satu sarana untuk mempermudah komunikasi, melakukan kegiatan-kegiatan media sosial, berselancar di dunia maya (*internet*), dan sebagainya.

Tulisan ini ingin memberikan suatu respon dan klarifikasi mengenai penetapan suatu barang tahan lama (*durable goods*) sebagai barang modal (*capital goods*), khususnya membahas mengenai kasus impor HP yang dimasukkan sebagai impor

barang modal oleh klasifikasi *Broad Economic Categories* (BEC). Respon dan klarifikasi terutama dihubungkan dengan proses penggunaan data impor pada waktu penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) yang juga dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Klasifikasi Barang Modal Berdasarkan BEC

BEC menyajikan klasifikasi berbagai barang impor menurut kategorinya. BEC menggolongkan impor barang menjadi tiga klasifikasi, yaitu impor barang konsumsi, impor bahan baku atau bahan penolong, dan impor barang modal. Klasifikasi BEC disusun dan diterbitkan oleh *United Nations*. Dengan mengikuti klasifikasi BEC, *leaflet* Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2015) mengklasifikasikan barang-barang impor yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2013 menurut tiga klasifikasi barang impor sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Barang Impor Indonesia Berdasarkan BEC, 2013

Uraian	Nilai Impor (dalam USD Miliar)
1. Barang konsumsi	13,1
2. Bahan baku/penolong	142,0
3. Barang modal:	31,5
a. Barang modal kecuali alat angkutan	26,1
b. Mobil penumpang	1,2
c. Alat angkutan untuk industri	4,2
Jumlah	186,6

Sumber: BPS (2014), diolah. Disajikan kembali oleh penulis dengan meringkas isi tabel.

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah impor barang yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2013 berjumlah USD 186,6 miliar. Impor barang modal, dengan klasifikasi berdasarkan BEC, senilai USD 31,5 miliar dengan salah satu rinciannya adalah barang modal (kecuali alat angkutan yang berjumlah sebesar USD 26,1 miliar).





Informasi selanjutnya dalam *leaflet* Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dinyatakan bahwa besarnya impor telepon untuk jaringan seluler (HP), dengan kode HS (*Harmonized System*) 8517120000, sebagai salah satu komponen impor barang modal, berjumlah USD 2.788 juta atau sekitar 8,84% dari total impor barang modal (sebesar USD 31,5 miliar).

Konsep Barang Modal dalam PDB

Menurut konsepnya, barang modal (*capital goods*) didefinisikan sebagai barang tahan lama (*durable goods*), yang biasanya memiliki umur pakai lebih dari satu tahun, yang digunakan sebagai perangkat atau peralatan untuk menghasilkan produk. Jadi, definisi ini merupakan kriteria pertama dalam menentukan suatu barang tahan lama merupakan barang modal. Barang-barang modal dapat berasal dari hasil produksi dalam negeri (*domestic production*) atau dari impor (*imported*).

Secara lengkap, barang-barang modal dalam PDB Indonesia dapat dibedakan atas berbagai jenis barang, yaitu:

- a. Barang-barang modal dalam bentuk bangunan atau konstruksi. Contohnya adalah bangunan bukan-tempat tinggal seperti pabrik, bangunan tempat tinggal seperti rumah tinggal atau apartemen yang disewakan, bangunan irigasi, jalan tol, dan sebagainya.
- b. Barang-barang modal dalam bentuk mesin mesin dan alat perlengkapan. Contohnya adalah mesin-mesin produksi, mesin-mesin penunjang produksi seperti perangkat-perangkat komputer yang menjalankan sistem produksi, serta alat-alat perlengkapan lainnya seperti sistem saluran air dalam suatu sistem produksi, pendingin ruangan atau *Air Condition* (AC).

- c. Barang-barang modal dalam bentuk alat angkutan. Barang-barang modal ini berupa kendaraan roda empat, seperti mobil dinas, mobil-mobil pengangkut seperti truk, atau kendaraan roda dua yang menunjang kegiatan-kegiatan usaha atau produksi.
- d. Barang-barang modal lainnya, seperti bibit padi pada kasus pertanian, dan bibit ternak pada kasus peternakan.

Dalam PDB, keempat jenis barang-barang modal ini digabung dalam suatu klasifikasi yang disebut sebagai pembentukan modal tetap bruto (PMTB)/(*gross fixed capital formation*) atau PMTB yang secara umum dikenal sebagai investasi fisik (*physical investment*). Investasi fisik memiliki peran yang penting dalam perekonomian suatu negara karena investasi merupakan motor penggerak suatu perekonomian untuk tumbuh (*investment is the engine of economic growth*).

PMTB didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan dan pembelian barang barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang-barang modal baru ataupun bekas dari luar negeri. Jadi, barang-barang modal yang berasal dari hasil-hasil produksi dalam negeri (domestik) harus merupakan barang-barang modal baru; sedangkan barang-barang modal yang berasal dari impor dapat berupa barang-barang modal baru atau bekas. Ini merupakan kriteria kedua dalam menentukan suatu barang tahan lama yang menjadi barang modal.

Suatu barang disebut sebagai barang modal jika barang tersebut digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan nilai tambah (*value added*) dari kegiatan-kegiatan mentransformasi *input* (seperti bahan baku) menjadi *output* (produk). Kegiatan-kegiatan usaha seperti ini disebut sebagai kegiatan ekonomi (*economic activities*). Dengan definisi ini, peralatan komputer

atau AC yang digunakan di rumah, baik yang berasal dari impor atau dari hasil produksi dalam negeri, tetapi bukan untuk usaha atau kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan nilai tambah, dianggap bukan merupakan barang modal. Peralatan komputer atau AC seperti ini diklasifikasikan sebagai barang konsumsi (*consumption goods*).

Demikian juga, untuk kasus-kasus mobil (kendaraan roda empat) atau motor (kendaraan roda dua), baik yang berasal dari impor atau hasil produksi dalam negeri, tetapi bukan untuk usaha atau kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan nilai tambah, dianggap bukan merupakan barang modal. Mobil atau motor seperti ini juga diklasifikasikan sebagai barang konsumsi. Jadi, kriteria ini merupakan kriteria ketiga untuk menetapkan suatu barang sebagai barang modal, yaitu dengan memperhatikan penggunaannya, apakah digunakan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah atau tidak. Jika ya, maka barang tersebut dianggap sebagai barang modal; sebaliknya jika tidak, maka barang tersebut tidak dianggap sebagai barang modal, dan dianggap sebagai barang konsumsi.

Khusus untuk HP, BPS yang berwenang dalam melakukan penyusunan PDB, tidak memperlakukan HP sebagai barang modal, tetapi memperlakukan HP sebagai input antara (*intermediate inputs*) walaupun HP digunakan sebagai penunjang bisnis atau usaha; apalagi jika HP digunakan sebagai perangkat rumah tangga atau sebagai konsumsi akhir (*final consumption*). Pertimbangan ini didasarkan kepada karakteristik HP yang dapat secara cepat berubah, misalnya dalam hal teknologinya sehingga mempengaruhi waktu penggunaannya.

Data BEC versus Data PDB Indonesia

Klasifikasi BEC dimaksudkan untuk memudahkan melakukan pengklasifikasian barang-barang impor. Karena informasi mengenai penggunaan sebenarnya barang-barang tahan lama impor yang terdapat dalam dokumen impor belum tersedia, maka secara garis besar (*broad*), BEC mengklasifikasikan barang-



barang impor modal menjadi tiga kategori, yaitu barang konsumsi, bahan baku/penolong, dan barang modal. Barang-barang modal dirinci lagi menjadi tiga kategori, yaitu barang modal kecuali alat angkutan, barang modal berupa mobil penumpang, dan alat angkutan untuk industri; dimana impor HP dimasukkan sebagai salah satu barang modal kecuali alat angkutan.

Dalam penyusunan PDB, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa HP, baik di impor atau hasil produksi dalam negeri (jika ada), tidak diperlakukan sebagai barang modal dalam penyusunan PDB; tetapi diperlakukan sebagai *input* antara jika digunakan dalam kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi, atau sebagai konsumsi akhir jika digunakan oleh rumah tangga (bukan kegiatan usaha). Dengan demikian, pada waktu menggunakan data impor barang yang diklasifikasikan berdasarkan BEC, BPS masih melakukan pengklasifikasian kembali data impor barang tersebut yang disesuaikan dengan konsep dan definisi penyusunan PDB, khususnya mengenai barang-barang modal. Jadi, data impor barang modal berupa HP yang bernilai USD 2.788 juta berdasarkan klasifikasi BEC tidak dimasukkan sebagai barang modal atau PMTB dalam PDB, tetapi dimasukkan salah satu klasifikasi, yaitu sebagai *input* antara atau sebagai konsumsi antara dalam PDB.

Penjelasan yang diberikan di atas menjadi suatu klarifikasi bahwa tidak semua data impor barang modal yang didasarkan kepada klasifikasi BEC dimasukkan sebagai barang modal atau PMTB atau investasi fisik dalam PDB Indonesia. Klarifikasi lebih lanjut masih perlu dilakukan untuk menentukan apakah suatu barang tahan lama, termasuk yang di impor (*imported durable goods*), diperlakukan sebagai barang modal atau tidak, yaitu tergantung kepada penggunaan barang impor yang tahan lama tersebut sebagai bagian dari kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai tambah atau digunakan sebagai konsumsi akhir.

Secara spesifik, HP tidak dimasukkan sebagai barang modal atau sebagai bagian dari PMTB atau investasi fisik, tetapi dimasukkan sebagai input antara atau konsumsi akhir dalam PDB Indonesia, agar klasifikasi barang-barang impor menjadi lebih akurat pada masa-masa yang akan datang, selain menggunakan berbagai hasil penghitungan PDB yang telah dilakukan dan tersedia di BPS, suatu studi untuk menelaah penggolongan berbagai barang-barang tahan lama impor, dan juga penggolongan berbagai barang-barang tahan lama lainnya seperti yang diproduksi di dalam negeri memang sangat perlu dilakukan.

BIODATA PENULIS

Nama : Slamet Sutomo
Organisasi : Staff Pengajar Sekolah Ilmu Statistik (STIS), Jakarta;
mantan Deputi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
Bidang Neraca dan Analisis Statistik
Email : slmt.sutomo@gmail.com

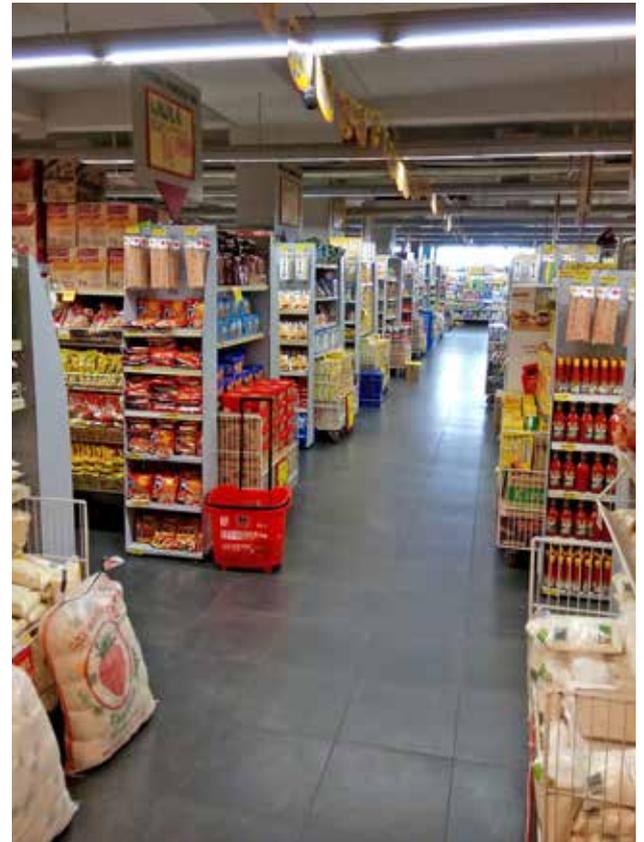
Masih Perluakah Stabilisasi Harga Pangan?



Wayan R. Susila

Harga pangan cenderung semakin bergejolak dan melonjak seperti fenomena lonjakan harga pangan yang terjadi pada tahun 2008 dan 2011. Saat itu, indeks harga pangan melonjak 40% tahun 2008 dan 41% pada tahun 2011 (FAO, 2015). Tahun 2011, pemerintah melalui Bulog berupaya melakukan impor beras untuk mengendalikan harga beras di dalam negeri, namun beras di pasar internasional seperti menghilang. Saat itu, harga beras mencapai USD 610/ton, naik hampir dua kali lipat dibandingkan harga normalnya yang berkisar antara USD 250-330/ton. Krisis pasar beras di pasar internasional tersebut diperparah oleh larangan ekspor beras yang dilakukan oleh Tiongkok yang kemudian diikuti oleh Thailand dan Vietnam.

Dipicu oleh lonjakan harga pangan tersebut, kebijakan stabilisasi harga pangan kembali memperoleh momentum kebangkitan seperti di era pemerintahan Orde Baru. Intensitas kebijakan stabilisasi harga pangan di Indonesia mulai menurun, khususnya setelah krisis moneter pada tahun 1997/1998 dan diikuti oleh runtuhnya rezim Orde baru. Puncak menurunnya



kebijakan stabilisasi harga ini terjadi ketika salah satu peran Bulog untuk menjaga menstabilkan harga untuk beberapa komoditi dihapuskan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 25/MPP/Kep/1/1998 tentang komoditas yang diatur tata niaga impornya. Keputusan ini menghapuskan peran Bulog dalam tata niaga beberapa pangan pokok seperti beras, gula, dan kedelai. Akan tetapi, ketika lonjakan harga pangan terjadi pada tahun 2008 dan 2011, pemerintah kembali mengambil posisi lebih aktif dalam upaya menstabilkan harga. Hal ini juga dipicu oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia menyadari perlunya kebijakan stabilisasi harga pangan. Tahun 2010, untuk pertama kalinya Bank Dunia duduk berdampingan dengan Bulog guna mencari solusi mengatasi gejolak harga pangan.

Mendapatkan momentum dan dukungan internasional untuk melakukan intervensi pasar, pemerintah akhirnya cenderung bertindak berlebihan terkait dengan kebijakan stabilisasi harga. Melakukan upaya stabilisasi harga ketika harga beras

melonjak tajam merupakan suatu kebijakan yang patut dipuji. Tetapi berupaya melakukan stabilisasi harga untuk pangan yang bukan pangan pokok dianggap tindakan berlebihan dan mungkin manfaatnya kurang sepadan dengan sumberdaya yang dihabiskan. Bahkan seorang pengamat mengatakan, “jangan-jangan pemerintah juga akan melakukan intervensi pasar ketika harga jengkol melonjak tajam!” karena gemas menghadapi tindakan pemerintah yang berlebihan.

Kecenderungan global menggiring kita bahwa stabilisasi harga pangan, khususnya pangan yang sangat pokok, memang masih diperlukan. Negara-negara berkembang seperti India bahkan mengeluarkan anggaran sebesar USD 21 miliar (IFPRI, 2013) dalam rangka stabilisasi harga dan keterjangkauan pangan. Seperti diketahui, stabilisasi harga pangan merupakan salah satu komponen utama keterjangkauan pangan (*food accessibility*), salah satu pilar dari ketahanan pangan. Bahkan, Undang-Undang Pangan No. 18/2013 dengan tegas mengamanatkan negara untuk mewujudkan ketahanan pangan, dimana keterjangkauan pangan ada di dalamnya.

Pertanyaannya sekarang adalah pangan mana saja yang harganya perlu distabilkan? Menstabilkan harga semua pangan adalah upaya pemborosan dan hampir tidak mungkin bisa dilakukan. Banyak kalangan baik kalangan pemerintah atau akademisi berpendapat bahwa pemerintah hanya perlu menstabilkan harga pangan pokok yang jumlahnya antara 10-20 pangan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, kedelai, terigu, daging sapi, aging ayam, dan telur ayam. Pemikiran ini tampak logis dan sepertinya akan terus menjadi pegangan pemerintah dalam melakukan stabilisasi harga pangan.

Terhadap pilihan tersebut, penulis mempunyai pemikiran yang agak berbeda. Jumlah pangan pokok yang menjadi objek stabilisasi harga masih terlalu banyak. Dengan mempertimbangkan efektivitas serta ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan dan mengawasi, maka jumlah pangan

pokok yang perlu distabilkan perlu dikurangi, misalnya hanya lima pangan pokok. India misalnya, hanya fokus pada beras, terigu, dan gula. Untuk dapat menetapkan sekitar lima pangan pokok, paling tidak ada tiga kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Peran pangan pokok dalam memenuhi gizi masyarakat.

Pemerintah wajib menstabilkan harga bahkan bila perlu memberi subsidi harga untuk pangan pokok yang menjadi sumber gizi utama (karbohidrat, protein, vitamin dan mineral) masyarakat. Ketidakmampuan masyarakat membeli pangan ini karena lonjakan harga, berpotensi membuat penurunan kesehatan dan kualitas SDM, yang akhirnya sangat menentukan daya saing bangsa. Sebagai contoh, beras akan masuk dalam kategori ini karena beras merupakan sumber utama karbohidrat/kalori masyarakat, berkontribusi lebih dari 50% dari total kebutuhan masyarakat. Telur ayam dan daging ayam juga sangat penting sebagai sumber protein utama yang murah bagi kebanyakan masyarakat. Yang mengejutkan, daging sapi tidak dijadikan sebagai sumber utama protein oleh masyarakat karena harganya yang terlalu tinggi sehingga jarang dikonsumsi bagi kebanyakan masyarakat.

2. Peran pangan pokok dalam pengeluaran rumah tangga.

Pemerintah hanya perlu menstabilkan pangan pokok yang berperan penting dalam pengeluaran rumah tangga yang dicerminkan oleh pangsa yang besar dalam pengeluaran rumah tangga. Lonjakan harga pangan kelompok ini akan membuat masyarakat mengalami penurunan daya beli, khususnya masyarakat berpendapatan rendah, yang berakibat pada kemiskinan. Pangsa pengeluaran rumah tangga untuk beras mencapai rata-rata sekitar 16,9%, sehingga wajar bila pemerintah menstabilkan harga beras. Beberapa pangan yang pangsa di atas 3% dari pengeluaran rumah tangga adalah terigu dan minyak goreng. Cabe memang dikonsumsi tiap hari, namun pangsa dalam pengeluaran rumah tangga sangat kecil yaitu 1,55% (BPS, 2013).





3. **Efektivitas dan efisiensi untuk melakukan stabilisasi harga.** Pemerintah sebaiknya hanya fokus menstabilkan harga pangan pokok yang efektif dapat dilakukan (target stabilisasi dapat dicapai) dan efisien dalam artian sumberdaya yang digunakan sepadan dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Banyak pangan pokok yang harganya sulit untuk distabilkan (dikendalikan) baik karena masalah teknis maupun pasar. Masalah teknis misalnya adalah aspek penyimpanan. Untuk komoditi yang sulit disimpan atau tidak bisa disimpan lama, maka upaya stabilisasi harga akan lebih sulit. Cabe adalah salah satu komoditi yang tidak bisa disimpan terlalu lama, atau memerlukan biaya yang sangat mahal jika disimpan agak lama. Artinya, jika stabilisasi harga dilakukan dengan pengendalian stok, maka pemerintah agak memerlukan biaya yang sangat mahal untuk memiliki stok yang memadai. Masalah pasar terkait dengan struktur pasar yang ada. Jika produsen maupun konsumen jumlahnya sangat banyak dan menyebar, maka upaya pengendalian harga akan lebih sulit dibandingkan jika pasarnya bersifat oligopoli atau monopoli. Menstabilkan harga daging sapi relatif lebih sulit karena jenis daging sapi yang diperdagangkan sangat banyak dan konsumennya juga sangat bervariasi. Jika diintervensi, timbul masalah karena belum jelas harga daging sapi mana yang distabilkan. Menyimpan daging sapi dalam volume yang besar dan banyak juga memerlukan biaya yang relatif besar. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, maka pangan

pokok berikut ini perlu diprioritaskan menjadi objek stabilisasi harga:

1. **Beras.** Beras menempati prioritas pertama karena dua hal yaitu peran penting dalam memenuhi gizi serta pangsa pengeluaran yang sangat dominan yaitu mencapai sekitar 17,9% dari rata-rata pengeluaran rumah tangga. Dari efektivitas dan efisiensi, posisinya memang agak rendah karena diproduksi tersebar dengan skala kecil. Namun demikian, daya simpan yang tinggi serta infrastruktur penyimpanan yang dimiliki Bulog yang sudah memadai, memberi indikasi bahwa beras adalah prioritas pertama untuk distabilkan.
2. **Terigu.** Terigu mendapat prioritas karena pangsa pengeluaran rumah tangga mencapai sekitar 5,6%, nomor dua setelah beras. Terigu juga berperan penting dalam memenuhi gizi masyarakat baik dalam bentuk mie instan maupun berbagai pangan olahan. Selanjutnya, stabilisasi harga akan efektif dan efisien dilaksanakan karena dapat disimpan lama dan pasarnya bersifat oligopoli.
3. **Kedelai.** Walaupun pangsa pengeluaran dalam rumah tangga termasuk sedang (2,62%) dalam bentuk pengeluaran untuk tempe dan tahu, kedelai perlu mendapat prioritas stabilisasi harga karena merupakan salah satu sumber utama protein masyarakat yang murah. Stabilisasi harga di tingkat pengguna relatif mudah dilakukan karena lebih dari 65 % adalah kedelai impor (jumlah importirnya terkendali) serta penggunaanya tergabung dalam sebuah koperasi produsen tahu dan tempe.



4. **Minyak Goreng.** Pangsa pengeluaran relatif besar yaitu sekitar 3,19%, menduduki posisi ketiga setelah beras dan terigu. Minyak goreng juga penting sebagai sumber protein dan vitamin. Upaya stabilisasi harga dapat berjalan relatif efektif dan efisien karena jumlah produsennya tidak terlalu banyak dan masih bisa dalam “kendali” pemerintah karena mereka tergabung dalam asosiasi produsen.
5. **Telur Ayam Ras.** Menduduki peringkat lima dalam pangsa pengeluaran (2,35%), telur ayam ras merupakan sumber utama protein yang murah sehingga terjangkau oleh masyarakat pendapatan rendah. Dari segi efektivitas dan efisiensi, stabilitas harga telur ayam memang memerlukan upaya yang lebih keras karena diproduksi oleh banyak produsen. Namun demikian, pasar untuk anakan, pakan, dan obat-obatan mendekati pasar yang oligopoli sehingga pemerintah dapat menstabilkan harga melalui produsen/penjual anakan, pakan, dan obat-obatan. Strategi ini kini dilakukan pemerintah dan terbukti cukup efektif dalam mengendalikan harga telur ayam.

Jika pemerintah ingin menambah satu atau dua pangan pokok, maka pilihannya adalah gula pasir dan susu. Gula pasir dan susu menduduki posisi penting dalam pangsa pengeluaran rumah tangga (2%). Gula pasir adalah sumber karbohidrat yang murah sementara susu merupakan sumber protein yang penting. Stabilisasi harga relatif efektif karena produsen dan pedagang besar kedua komoditi tersebut jumlahnya terbatas.

Sebagai catatan tambahan, dua komoditi yang sering membuat heboh yaitu cabe dan daging sapi, tidak memiliki dasar yang kuat untuk harganya distabilkan pemerintah. Dari segi pangsa pengeluaran, keduanya relatif kecil, masing-masing 1,5% dan 0,76%. Dari segi gizi, cabe tidaklah sepenting beras, kedelai, atau telur ayam. Daging sapi memang kandungan gizinya tinggi, tetapi bukanlah sumber utama protein kebanyakan masyarakat karena harganya terlalu tinggi.

Stabilisasi harga cabe tidak bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Cabe, disamping fluktuasi harganya demikian tajam (Rp 7000 – Rp 100.000) karena pengaruh fluktuasi produksi akibat musim dan penyakit, teknologi penyimpanan juga belum tersedia untuk dapat menyimpan lama. Oleh karena itu, ketika harga cabe melambung tinggi, pemerintah tidak perlu melakukan intervensi. Biarlah masyarakat menyesuaikan konsumsi cabe mereka karena tidak akan berpengaruh besar pada gizi masyarakat. Khusus untuk cabe, walaupun harganya distabilkan, argumennya bukan karena pangan pokok, tetapi karena alasan menekan inflasi.

Menstabilkan harga daging sapi juga rumit karena jenis daging sapi sangat banyak dan pasarnya terdiferensiasi. Misalnya, meningkatkan impor daging sapi beku tidak akan menurunkan harga daging sapi secara signifikan karena daging sapi impor lebih banyak untuk hotel dan restoran. Menyimpan daging sapi beku untuk operasi pasar juga akan sangat mahal. Kalau daging sapi dianggap sangat penting pada momen-momen tertentu seperti lebaran, tindakan pemerintah dengan memberikan subsidi harga hanya pada masyarakat miskin akan lebih efektif.

Sebagai catatan penutup, pemerintah masih perlu melakukan kebijakan stabilisasi harga pangan pokok sesuai dengan dinamika pasar pangan dan juga sesuai dengan amanat UU Pangan. Demi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan stabilisasi, pemerintah sebaiknya hanya fokus pada sekitar lima pangan pokok yang benar-benar penting dari sisi gizi dan pengeluaran rumah tangga. Kalau ada komoditi yang tidak memenuhi kriteria tersebut namun dianggap penting pada momen-momen tertentu, kebijakan yang lebih efektif adalah memberikan subsidi harga terbatas hanya pada golongan miskin.

BIODATA PENULIS

Nama : Wayan R. Susila
 Jabatan : Tenaga Ahli Asosiasi Gula Indonesia
 Email : wr_susila@yahoo.com



Kementerian Perdagangan kembali mengeluarkan kebijakan penggunaan *Letter of Credit* (L/C) untuk ekspor barang tertentu yang dituangkan dalam Permendag Nomor 04/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 dan dilengkapi dengan Permendag Nomor 26/M-DAG/PER/3/2015 tanggal 30 Maret 2015 tentang Ketentuan Khusus Pelaksanaan Penggunaan L/C untuk Ekspor Barang Tertentu. Pada tahun 2009, Kementerian Perdagangan pernah mengeluarkan kebijakan sejenis melalui Permendag Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 tentang penggunaan L/C, namun hanya terbatas pada ekspor timah dan minyak sawit mentah yang nilainya lebih dari satu juta USD. Dengan pertimbangan kebijakan ekspor telah berjalan baik dan adanya peningkatan cadangan devisa, kebijakan ini akhirnya dihentikan sejak Juni 2010. Kini, wajib L/C akan kembali berlaku mulai 1 April 2015.

Menurut Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, alasan utama pemberlakuan kembali kebijakan ini adalah untuk mendukung upaya pelestarian sumber daya alam, peningkatan tertib usaha

dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor barang (syarat ekspor), mendorong peningkatan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan pengembangan industri serta optimalisasi dan akurasi perolehan devisa hasil ekspor (kontrol devisa). Selain itu, Menteri Perdagangan juga menilai kebijakan ini akan memberikan manfaat bagi eksportir, yaitu rasa aman dalam bertransaksi serta kepastian order dan kepastian produksi.

Dalam skala prioritas, tentu saja pemberlakuan kembali kebijakan wajib L/C akan lebih besar peranannya sebagai alat kontrol devisa. Meskipun, pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 13/20/PBI/2011 tanggal 30 September 2011 sudah mewajibkan seluruh eksportir untuk mencantumkan nilai Devisa Hasil Ekspor (DHE) dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Pemerintah tetap membutuhkan instrumen lain sebagai alat kontrol devisa. DHE dinilai sangat penting peranannya dalam mendukung terciptanya pasar keuangan yang sehat dan menjadi sumber dana yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, sekalipun PBI masih berlaku sampai saat ini, Permendag yang mewajibkan L/C untuk ekspor barang tertentu diberlakukan kembali.

Empat komoditas yang diwajibkan untuk menggunakan L/C dalam Permendag baru ini adalah *Crude Palm Oil* (CPO) dan *Crude Palm Kernel Oil* (CPKO), mineral termasuk timah (kecuali timah batangan), batu bara, minyak bumi dan gas bumi. Alasan pemilihan komoditas tersebut adalah nilai keunggulan komparatif yang dimiliki masing-masing dan wujudnya sebagai sumber daya alam yang harus dijaga keberlanjutannya serta harus ditingkatkan nilai tambahnya. Selain itu, keempat komoditas tersebut memiliki porsi yang besar terhadap nilai total ekspor. Menurut data BPS, total rata-rata nilai ekspor keempat komoditas tersebut dalam 5 tahun terakhir (2009-2013) sebesar USD 71,04 miliar atau mencapai 41,77% dari pangsa ekspor. Sementara nilai ekspornya pada Januari-September 2014 sebesar USD 43,86 miliar atau 33,05% dari pangsa ekspor. Melihat nilainya, maka tak berlebihan bila pemerintah berharap adanya peningkatan nilai DHE dengan berlakunya kembali kebijakan ini. (Primakrisna T.)

Kemendag Kembali Wajibkan *Letter of Credit (L/C)* Ekspor Barang Tertentu

Buah Impor Tercemar Bakteri, Momentum Bangkitnya Buah Lokal

Awal Januari 2015 Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Kementerian Pertaniannya atau *United States Department of Agriculture* (USDA) memperingatkan negara-negara importir apel termasuk Indonesia. Peringatan tersebut terkait temuan bakteri berbahaya *Listeria monocytogenes* pada apel produksi negara AS. Ada dua jenis apel yang terkena bakteri yaitu Granny Smith dan Gala. Kedua produk ini cukup populer di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Pada kesempatan itu *The Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) juga merilis bahwa bakteri ini mematikan. Terdapat 11 negara bagian AS telah terinfeksi, sebanyak 31 orang dirawat di rumah sakit, dan tujuh meninggal, diantaranya tiga kasus kematian dipastikan terkait bakteri *Listeria monocytogenes*. Bakteri ini juga merupakan penyebab kematian terbanyak nomor tiga pada kasus keracunan makanan. Itu sebabnya Pemerintah AS menarik produk-produk apel *Granny Smith* dan *Gala* dari peredaran tak terkecuali di Indonesia bilamana ditemukan.



Pemerintah Indonesia langsung merespon walaupun menurut investigasi dan informasi dari importir buah dan sayuran, bahwa akhir-akhir ini tidak mengimpor kedua jenis apel tersebut. Namun, untuk meyakinkan, langkah konkret dilakukan dengan membentuk tim gabungan antara pemerintah dan importir, dengan menggelar inspeksi ke pasar-pasar buah untuk mengecek kemungkinan adanya peredaran dua jenis apel impor asal AS yang bermasalah terkait bakteri berbahaya dimaksud. Aksi ini dilakukan tanggal 29 Januari 2015, oleh tim Kementerian Perdagangan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM),

serta Asosiasi Eksportir-Importir Buah dan Sayur Segar Indonesia (ASEIBSSINDO). Kegiatan berlangsung di wilayah Jakarta dan sekitarnya di pasar modern dan tradisional, mengecek langsung ke lapangan dan sekaligus mensosialisasikan kepada konsumen soal informasi kasus produk olahan apel berbakteri di AS. Selain itu beberapa pemerintah daerah juga berinisiatif melakukan aksi serupa, untuk memastikan apakah ada apel berbakteri dari jenis *Granny Smith* dan *Gala* beredar di Indonesia. Hasilnya, tidak ditemukan kedua jenis apel dimaksud di pasar Indonesia. Sampai saat ini, ASEIBSSINDO mengaku bahwa selama ini anggotanya tidak mengimpor dua jenis apel tersebut. Pemerintah harus tetap tegas jika menemukan importir yang nakal.

Menurut Badan Karantina Pertanian (Barantan), pihaknya akan mengawasi dengan ketat berbagai produk apel segar khususnya yang berasal dari AS. Berdasarkan data terakhir Barantan bulan Januari 2015, impor apel AS yang masuk sejak Januari 2014 hingga 25 Januari 2015 mencapai 30% dari total impor apel 145.225 ton atau setara 41.000 ton. Dijelaskan bahwa AS menjadi salah satu eksportir apel terbesar di Indonesia yang mencapai 30%, dibawah Tiongkok sebagai pemasok apel terbesar yang mencapai hampir 60%, sisanya adalah Selandia Baru, Australia, Afrika, Perancis, Singapura, Myanmar, Argentina, dan Italia. Pada tahun 2014, ekspor apel AS sebesar 40.850 ton ke Indonesia, tahun 2013 tercatat sebesar 31.528 ton, kemudian sebanyak 52.729 ton di 2012 dan 50.983 ton di tahun 2011. Apel yang diimpor dari AS bukanlah jenis *Granny Smith* dan *Gala* yang saat ini tengah ramai dibicarakan karena terkontaminasi bakteri *Listeria monocytogenes*. Jenis apel yang diimpor dari Amerika adalah jenis *Washington*. Selama ini tidak pernah ada masalah dan hasil pengamatan Barantan pasca penemuan bakteri *Listeria monocytogenes* terbukti bebas dari pencemaran zat berbahaya maupun mikro bakteri yang berbahaya bagi kesehatan.

Menyikapi merebaknya pencemaran buah impor saat ini, Menteri Perdagangan menilai bahwa kejadian ini bisa dijadikan momentum bagi produk buah lokal untuk memenuhi permintaan pasar dalam negeri. Kementerian Perdagangan telah mengirim surat kepada seluruh pemerintah daerah dan dinas terkait lainnya di Indonesia, agar melakukan operasi pasar terhadap apel impor asal AS yang terkontaminasi bakteri membahayakan kesehatan manusia. Instruksinya, menarik peredaran apel impor dari AS untuk jenis *Granny Smith* dan *Gala*, dan selanjutnya mensosialisasikan produk impor yang boleh beredar di pasar Indonesia harus berkualitas. **(Suler Malau)**

Memperjuangkan Nasib Karet Indonesia

Melimpahnya stok karet dunia telah menyebabkan penurunan harga karet dunia. Penurunan harga ini juga berdampak terhadap ekspor Indonesia, bahkan dampaknya terasa sampai ke beberapa pelosok Sumatera dan Kalimantan. Hal ini terjadi karena karet adalah salah satu komoditas andalan ekspor Indonesia yang banyak ditanam di kedua wilayah tersebut. Menurut data Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (GAPKINDO), harga karet dunia terus merosot dari USD 5/kilogram pada 2011 menjadi USD 1,48/kilogram di awal 2015. Akibatnya, Asosiasi Petani Karet Indonesia (APKRINDO) mencatat harga karet petani lokal pun ikut anjlok sampai Rp 5.000/ kg.

Sebagai negara kedua terbesar penghasil dan pengeksport karet alam dunia, Pemerintah berupaya mengatasi dampak penurunan harga ini melalui berbagai cara. Pada pertemuan *International Tripartite Rubber Council* (ITRC) bulan November 2014 di Kuala Lumpur, Indonesia mengusulkan pengembangan kerjasama ITRC yang beranggotakan Indonesia, Thailand dan Malaysia menjadi *ASEAN Rubber Council* (ARC) yang beranggotakan negara-negara ASEAN agar dapat secara

bersama-sama memaksimalkan usaha dalam mengatasi anjloknya harga karet dunia. Selain melalui meja perundingan pemerintah juga berencana mengalihkan pasar ekspor karet Indonesia ke pasar dalam negeri dengan melakukan penambahan alokasi karet. Selama ini hanya 15% dari total produksi karet yang terserap ke pasar dalam negeri dengan porsi terbesar untuk kebutuhan industri ban.

Rencana ini tentu saja disambut baik para pelaku usaha karet di dalam negeri. Melalui GAPKINDO, para pelaku berharap pemerintah akan serius dengan rencana penambahan alokasi karet untuk pasar dalam negeri yang disertai dengan hilirisasi industri karet. Hilirisasi produksi berperan penting karena pemanfaatan produk olahan karet untuk kebutuhan dalam negeri membutuhkan industri penopang. Para pelaku usaha juga berharap niat baik Pemerintah untuk meningkatkan permintaan dan mempromosikan penggunaan karet alam di dalam negeri sebesar 10% per tahun, diantaranya untuk konstruksi jalan dan tol laut, bendungan, bantalan dermaga serta bantalan rel kereta api segera direalisasikan. (Primakrisna T.)





Pengetatan Pengawasan Ekspor-Impor Migas

Awal tahun 2015, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengeluarkan aturan baru terkait perdagangan luar negeri untuk Migas dan Bahan Bakar lainnya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 03/M-DAG/PER/1/2015 tanggal 5 Januari 2015 tentang Mekanisme Ekspor-Impor Migas dan Bahan Bakar Lainnya. Kebijakan baru ini merupakan penyempurnaan ketentuan yang diatur pada Permendag No. 42/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak dan Gas Bumi (Migas).

Terbitnya peraturan baru ini merupakan salah satu upaya mewujudkan rencana peningkatan ekspor sebesar 300% pada tahun 2019 melalui penataan kembali perdagangan sektor energi, khususnya ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak (BBM), gas bumi, dan bahan bakar lainnya. Melalui peraturan baru ini pengawasan kegiatan ekspor impor migas semakin diperketat guna mengamankan sumber devisa yang cukup besar bagi negara.

Ketentuan yang sangat prinsip yang diatur dalam Permendag yang baru ini yang membedakan dengan Permendag sebelumnya yaitu: Pertama, mewajibkan seluruh pelaku usaha ekspor dan impor migas melakukan registrasi sebagai Importir Terdaftar (IT) maupun Eksportir Terdaftar (ET), sebelum mendapatkan Surat Persetujuan Ekspor dan Impor. Kedua, setiap melakukan ekspor dan impor migas eksportir maupun importer harus mendapat Surat Persetujuan Ekspor dan Impor dari Kementerian Perdagangan, setelah ada pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketiga, setiap melakukan ekspor dan impor migas wajib terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh *Surveyor* Independen yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan. Teknis pelaksanaan verifikasi agar efektif dilakukan sebelum pengapalan dengan maksud memastikan migas yang akan diekspor sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.

Hal ini dilakukan untuk melindungi BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan di dalam negeri terhindar dari penyalahgunaan pihak-pihak tertentu yang mencoba mengambil keuntungan. Ketentuan ekspor impor migas dalam permendag sebelumnya hanya memerlukan persetujuan ekspor dan impor dari Kementerian Perdagangan setelah ada rekomendasi dari Kementerian ESDM, tanpa diperlukan registrasi ET dan IT. Kebijakan pengetatan pengawasan, memberikan keleluasaan bertindak untuk mencegah terjadinya penyelundupan BBM dan diperlukan konsistensi dalam implementasinya. Temuan atas pelaku yang melakukan pelanggaran, harus diberikan sanksi tegas berupa pencabutan ET maupun IT yang bersangkutan supaya memberikan efek jera.

Agar efektif, tindakan pengetatan pengawasan ini perlu dilakukan secara terintegrasi terutama antara Kemendag sebagai regulator di bidang Perdagangan dan Kementerian ESDM selaku instansi yang paling berkepentingan di hilir dan di hulu. Kementerian ESDM dituntut untuk mampu mengeluarkan kebijakan yang sama guna mencegah penyelewengan BBM.

Kemudahan berusaha juga sangat penting, sehingga aturan baru yang efektif berlaku mulai tanggal 7 April 2015 ini menjamin proses pelayanan perijinan dilakukan secara *online* melalui INATRADE. Waktu yang diperlukan untuk memproses perijinan hanya tiga hari setelah dokumen lengkap dan benar. Kebijakan ini juga merekomendasikan bahwa untuk mendapatkan ET, perusahaan harus memenuhi persyaratan, antara lain memiliki Angka Pengenal Eksportir (APE), Izin Usaha, Nomor Induk Kepabeanaan (NIK), Surat Izin Usaha Perniagaan (SIUP). Sementara untuk persyaratan IT, antara lain memiliki Angka Pengenal Importir (API) dan, Surat Izin Usaha Perniagaan (SIUP). Penerbitan IT maupun ET harus ada surat rekomendasi dari Kementerian ESDM, sedangkan dari Kemendag dibutuhkan Surat Persetujuan Ekspor (SPE) untuk ekspor serta Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk impor. **(Suler Malau)**

Rapat Kerja Kementerian Perdagangan Tahun 2015

Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Raker Kemendag) dilaksanakan pada hari Senin-Rabu, 26-28 Januari 2015 di Auditorium Kemendag dengan tema Strategi Merebut Pangsa Pasar Ekspor dan Memperkuat Pasar Dalam Negeri. Raker kali ini diawali dengan diskusi interaktif yang dipandu Suryoprato dari Metro TV dengan narasumber Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian Syarif Hidayat, dan Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian, Mat Syukur. Dalam kesempatan ini Menteri Perdagangan menyampaikan Kemendag menargetkan peningkatan ekspor hingga 300% selama lima tahun hingga 2019 dan seluruh pejabat perwakilan perdagangan di luar negeri akan menjadi ujung tombak peningkatan ekspor nasional ini. Selain itu, Mendag juga mengajak seluruh kekuatan Kemendag untuk bersama-sama memperkuat sinergi, menguatkan komitmen,



serta meningkatkan koordinasi semua pemangku kepentingan demi mewujudkan target dan sasaran strategis pembangunan nasional di sektor perdagangan, sesuai Rencana Strategis Kemendag dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Sejumlah pejabat perwakilan perdagangan di luar negeri seperti Atase Perdagangan yang tersebar di 24 negara, ITPC di 19 kota di dunia, Konsul Perdagangan di Hong Kong, Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan, serta perwakilan dinas-dinas perdagangan provinsi dan kabupaten/kota hadir dalam raker ini. Melalui raker, Kemendag mengharapkan adanya sinkronisasi program antara pemerintah pusat, perwakilan perdagangan di luar negeri, dan dinas-dinas yang membidangi perdagangan di daerah di seluruh Indonesia.

Rapat Dewan Redaksi Buletin Ilmiah Perdagangan

Rapat Dewan Redaksi Buletin Ilmiah Perdagangan (BILP) Edisi I tahun 2015 dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Januari 2015 di Ruang Dahlia Kementerian Perdagangan. Rapat dihadiri oleh Sekretaris BP2KP, Kepala Pusat Data dan Informasi BP2KP, Akademisi dan Peneliti Senior yang tergabung sebagai Mitra Bestari serta Redaksi Buletin Ilmiah Perdagangan. Dalam rapat kali ini, Mitra Bestari menilai pilihan topik penelitian lebih beragam dengan kualitas penulisan yang semakin baik.



Rapat Dewan Redaksi Bunga Rampai Info Komoditi



BP2KP Kementerian Perdagangan melaksanakan Rapat Dewan Redaksi Bunga Rampai Info Komoditi (BRIK) untuk Edisi I tahun 2015 pada hari Jumat, 30 Januari 2015 di Ruang Rapat BP2KP Kementerian Perdagangan yang dihadiri oleh Kepala Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Perwakilan dari Pusat-Pusat di lingkungan BP2KP, serta Ketua Tim Penulis BRIK 2015. Dalam pertemuan perdana ini disepakati 2 tema besar BRIK 2015, yaitu Tekstil dan Rumput Laut. Selain itu, pada tahun ini penulisan BRIK rencananya akan dirangkaikan dengan acara Bedah Buku yang baru pertama kali diselenggarakan oleh BP2KP.

Diskusi Terbatas Awal Tahun 2015

BP2KP Kementerian Perdagangan menyelenggarakan Forum Diskusi Terbatas Awal Tahun 2015 pada hari Senin, 23 Februari 2015 di Auditorium Kementerian Perdagangan dengan tema "*Rethinking* Kebijakan Perdagangan Menuju Target Ekspor 2015". Narasumber dalam forum kali ini adalah Direktur *Eksekutif* Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Hendri Saporini dan Pengamat Ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Tony Prasetiantono. Selain itu hadir pula pakar ekonomi Bustanul Arifin, Faisal Basri, Enny Srihartati dan Suryopratomo sebagai moderator. Hadir sebagai peserta adalah seluruh pejabat eselon I dan II Kementerian Perdagangan serta beberapa perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan Pemimpin Redaksi beberapa media. Tujuan diselenggarakannya forum ini adalah untuk mendapatkan masukan tentang strategi Indonesia menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 dan mendiskusikan target peningkatan ekspor Indonesia.

Dalam presentasinya, kedua narasumber menyatakan mendukung peningkatan target ekspor. Hendri Saporini menyampaikan target peningkatan ekspor nasional hingga 300% pada 2019 bisa terjadi jika diiringi dengan peningkatan daya saing. Selain itu untuk mendorong ekspor juga diperlukan investasi sehingga daya saing sektor investasi turut menjadi tolok ukur untuk mencapai keberhasilan target ekspor. Sementara itu, Tony Prasetiantono mengusulkan agar pemerintah melakukan penguatan industri dalam negeri sebagai substitusi barang impor dan langkah untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.





Konsiyering ROP Tahun 2015

Konsiyering Rencana Operasional (ROP) BP2KP tahun 2015 berlangsung pada hari Senin-Rabu, 16-18 Februari 2015 di Bandung, Jawa Barat. Acara ini dihadiri oleh Kepala BP2KP beserta seluruh Pejabat Eselon II, Staf Ahli bidang Diplomasi Perdagangan Luar Negeri dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Kementerian Perdagangan, Evaluator dari LIPI, BPS, AIPEG, EU-TCF, serta Para Peneliti di Lingkungan BP2KP.



Diseminasi Hasil Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan di Provinsi Sulawesi Selatan

BP2KP Kementerian Perdagangan menggelar diseminasi Hasil Pengkajian dan Pengembangan kebijakan Perdagangan pada hari Kamis, 23 April 2015 di Kantor UPTD P3ED Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan. Diseminasi kali ini menyajikan 2 hasil kajian yaitu Kajian Pengembangan Kinerja Logistik (Kasus Baja) dari Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Analisis Dampak Kebijakan Restriksi Negara Mitra Dagangan Terhadap Pencapaian Ekspor Non Migas Indonesia 2014 dari Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri. Acara ini dibuka oleh Kepala BP2KP dan turut dihadiri oleh Sekretaris BP2KP dan para Kepala Pusat di lingkungan BP2KP dengan peserta perwakilan dari instansi terkait di Provinsi Sulawesi Selatan.



PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK
DAN BARANG JENIS LAINNYA SECARA NASIONAL
SELAMA BULAN OKTOBER 2014 SAMPAI DENGAN FEBRUARI 2015

NO	KOMODITI	SATUAN	2014			2015 Jan	FEBRUARI Minggu				"Rata2 2015" Jan'15 :	Feb "Prbhn Des'14 (%)"
			Okt	Nov	Des		Mg I	Mg II	Mg III	Mg IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Beras Medium	Kg	8,930	9,067	9,340	9,634	9,756	9,783	9,838	10,298	9,919	3.15
2	Gula Pasir	Kg	11,141	11,156	11,216	11,169	11,164	11,153	11,170	11,144	11,158	(0.42)
3	Minyak Goreng Kemasan	Ltr	14,865	14,906	15,003	15,106	15,146	15,094	15,100	15,090	15,108	0.69
4	Minyak Goreng Curah	Ltr	11,376	11,352	11,302	11,331	11,269	11,260	11,270	11,269	11,267	0.26
5	Daging Sapi	Kg	100,148	99,797	100,536	101,400	101,393	101,476	101,542	101,672	101,521	0.86
6	Daging Ayam Broiler	Kg	27,564	27,017	27,715	30,733	29,597	29,297	28,284	27,460	28,659	10.89
7	Daging Ayam Kampung	Kg	60,980	59,802	59,942	60,971	60,163	59,274	59,304	59,081	59,455	1.72
8	Telur Ayam Ras	Kg	19,931	19,776	20,518	22,876	22,778	22,299	21,945	21,354	22,094	11.49
9	Telur Ayam Kampung	Kg	41,468	41,188	41,347	41,829	41,218	41,401	41,277	41,068	41,241	1.17
10	Susu Kental Manis	397g	10,038	10,124	10,187	10,206	10,250	10,277	10,288	10,318	10,283	0.19
11	Tepung Terigu	Kg	8,826	8,815	8,828	8,840	8,794	8,786	8,804	8,811	8,799	0.14
12	Kedelai Impor	Kg	11,196	11,238	11,305	11,235	11,130	11,174	11,187	11,140	11,158	(0.62)
13	Kedelai lokal	Kg	10,783	10,859	11,003	10,954	10,966	10,978	11,058	11,065	11,017	(0.44)
14	Mie Instant	Bngks	1,972	1,979	2,005	2,024	2,050	2,053	2,050	2,068	2,055	0.94
15	Cabe Merah Keriting	Kg	32,552	53,779	70,200	49,122	31,587	28,722	27,475	25,067	28,212	(30.03)
16	Cabe Merah Biasa	Kg	30,832	50,372	70,733	43,174	26,927	25,167	24,345	22,847	24,822	(38.96)
17	Bawang Merah	Kg	19,893	19,218	19,686	22,356	22,324	21,815	21,408	21,425	21,743	13.56
18	Bawang Putih	Kg	16,168	16,266	16,796	17,569	17,481	17,421	17,393	17,255	17,388	4.60
19	Ikan Teri Asin	Kg	64,472	63,996	64,552	66,295	65,710	65,520	65,805	65,903	65,734	2.70
20	Kacang Hijau	Kg	19,040	19,096	19,226	19,218	19,151	19,173	19,247	19,495	19,267	(0.04)
21	Kacang Tanah	Kg	19,103	19,134	19,688	20,151	20,350	20,414	20,562	20,692	20,504	2.35
22	Ketela Pohon	Kg	5,221	5,147	5,164	5,165	5,187	5,178	5,075	5,071	5,128	0.03
23	Jagung Pipilan	Kg	6,266	6,343	6,427	6,419	6,401	6,393	6,402	6,402	6,399	(0.13)

Catatan: Per Februari Tahun 2013, Satuan Minyak Goreng Kemasan dan Minyak Goreng Curah Berubah Menjadi 1 Liter.
Sumber: Dinas Perindag, diolah Ditjen PDN

Neraca Perdagangan Indonesia
Periode 2010-2015 (Januari-Januari)

No. URAIAN	Nilai : Juta USD					JAN-JUN		Perub 13/12 (%)	Trend 08-12(%)
	2008	2009	2010	2011	2012	2012	2013		
I. - Ekspor	157,779.1	203,496.6	190,020.3	182,551.8	176,292.7	14,472.3	13,355.8	-7.71	1.14
- Migas	28,039.6	41,477.0	36,977	32,633.0	30,331.9	2,501.7	2,076.8	-16.98	-0.82
- Non Migas	129,739.5	162,019.6	153,043.0	149,918.8	145,960.8	11,970.6	11,279.0	-5.78	1.59
II. - Impor	135,663.3	177,435.6	191,689.5	186,628.7	178,178.8	14,916.2	12,612.3	-15.45	6.14
- Migas	27,412.7	40,701.5	42,564.2	45,266.4	43,459.9	3,550.5	2,115.1	-40.43	10.83
- Non Migas	108,250.6	136,734.0	149,125.3	141,362.3	134,718.9	11,365.7	10,497.2	-7.64	4.82
III. - Total Perdagangan	293,442.4	380,932.2	381,709.7	369,180.5	354,471.5	29,388.5	25,968.1	-11.64	3.53
- Migas	55,452.3	82,178.6	79,541.4	77,899.4	73,791.8	6,052.2	4,191.9	-30.74	5.32
- Non Migas	237,990.1	298,753.6	302,168.3	291,281.1	280,679.7	23,336.3	21,776.2	-6.69	3.09
IV. - Neraca	22,115.8	26,061.1	-1,669.2	-4,076.9	-1,886.2	-443.9	743.6	-267.49	-
- Migas	626.9	775.5	-5,586.9	-12,633.3	-13,128.0	-1,048.9	-38.3	-96.35	-
- Non Migas	21,488.9	25,285.5	3,917.7	8,556.4	11,241.9	604.9	781.9	29.24	-21.17

Sumber : BPS (2015), diolah Pusdatin, BP2KP Kementerian Perdagangan

Neraca Perdagangan Indonesia
Periode November 2014 - Februari 2015*

URAIAN	NILAI (JUTA USD)				JAN - JUL		PERUBAHAN 13/12 (%)
	APR	MEI	JUN	JUL *)	2012	2013*	
I Ekspor	13,616.2	14,621.3	13,355.8	12,289.1	29,106.4	25,644.9	-11.89
- Migas	2,106.9	2,353.3	2,076.8	1,893.6	5,230.8	3,970.4	-24.10
- Non Migas	11,509.3	12,268.0	11,279.0	10,395.4	23,875.6	21,674.5	-9.22
II Impor	14,041.6	14,434.5	12,612.3	11,550.8	28,706.9	24,163.1	-15.83
- Migas	3,473.0	3,389.5	2,115.1	1,719.6	7,007.7	3,834.6	-45.28
- Non Migas	10,568.6	11,045.0	10,497.2	9,831.3	21,699.2	20,328.4	-6.32
III Total Perdagangan	27,657.8	29,055.8	25,968.1	23,839.9	57,813.3	49,808.0	-13.85
- Migas	5,579.9	5,742.8	4,191.9	3,613.2	12,238.5	7,805.0	-36.23
- Non Migas	22,077.9	23,313.0	21,776.2	20,226.7	45,574.8	42,002.9	-7.84
IV Neraca	-425.4	186.8	743.6	738.3	399.5	1,481.8	270.92
- Migas	-1,366.1	-1,036.2	-38.3	174.1	-1,776.9	135.8	-107.64
- Non Migas	940.8	1,223.0	781.9	564.2	2,176.4	1,346.1	-38.15

Sumber : BPS (2015), diolah Pusdatin, BP2KP Kementerian Perdagangan

Catatan : *) Angka Sementara

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA, Periode 2010 - 2015 (Januari-Januari)

(Nilai : Juta USD)



Sumber : BPS (2015), diolah Pusdatin, BP2KP Kementerian Perdagangan

EKSPOR - IMPOR INDONESIA, 2009 - 2014 (JANUARI-AGUSTUS)

(Nilai : Juta USD)



Sumber : BPS (2015), diolah Pusdatin, BP2KP Kementerian Perdagangan